



**DINAMIKA KERAJAAN MATARAM ISLAM PASCA
PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755-1830**

SKRIPSI

Oleh

**Komar Faridi
NIM 120210302044**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**DINAMIKA KERAJAAN MATARAM ISLAM PASCA PERJANJIAN
GIYANTI TAHUN 1755-1830**

SKRIPSI

diajukan sebagai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjana strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan
Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Komar Faridi
NIM 120210302044**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Samiyati dan Ayahanda Muhammad Jayus yang tercinta, yang telah membesarkanku dengan sepenuh hati dan kasih sayang, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta do'a disetiap langkahku, yang selalu mengingatkanku ketika jalanku sudah tak sesuai dengan kebenaran, dan selalu mengingatkanku akan ibadah;
2. Guru-guruku SDN Kalitapan 1, SMPN 1 Tapan, SMAN 1 Tenggarang, dan para Dosen yang terhormat di Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
3. Nur Wihdatul Hasanah terimakasih untuk dukungan, bantuan do'a serta semangat yang tiada henti demi terselesainya skripsi ini;
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi.

MOTTO

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”.

(Ali bin Abi Thalib)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komar Faridi

NIM : 1202010302044

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2017

Yang menyatakan,

Komar Faridi
NIM 120210302044

SKRIPSI

**DINAMIKA KERAJAAN MATARAM ISLAM PASCA PERJANJIAN
GIYANTI TAHUN 1755-1830**

Oleh

Komar Faridi
NIM 120210302044

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Dr. Sri Handayani, M. M.

Dosen Pembimbing II : Drs. Sumarjono, M. Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “DINAMIKA KERAJAAN MATARAM ISLAM PASCA PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755-1830” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Jum’at, 12 Mei 2017

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial / Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Jember

Tim Penguji;

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sri Handayani, M. M.
NIP. 198503195212012002

Drs. Sumarjono, M. Si.
NIP. 195808231987021001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Kayan Swastika, M. Si.
NIP. 196702102002121002

Drs. Sumarno, M. Pd.
NIP. 195221041984031002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Dr. Sunardi, M. Pd
NIP. 195405011983031005

RINGKASAN

Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830; Komar Faridi, 120210302044; xv +79 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 1586. Kerajaan Mataram merupakan suatu kerajaan yang sangat kuat kekuasaannya atas Pulau Jawa sebelum mengalami perpecahan dalam persetujuan Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh Sunan Pakubuwana III), dan pihak pemberontak dari kelompok Pangeran Mangkubumi yang menjadi solusi bagi salah satu kerusuhan yang terus terjadi di Mataram. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai memudarnya Kerajaan Mataram. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti (ejaan Belanda, sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo), di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah jika diperlukan. Gambar lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti dapat dilihat pada lampiran halaman 77.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana dinamika Kasultanan Yogyakarta pasca perjanjian Giyanti tahun 1755-1830; (2) bagaimana dinamika Kasunanan Surakarta pasca perjanjian Giyanti tahun 1755-1830.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis dinamika dalam bidang politik, agama maupun dalam bidang kebudayaan yang terjadi Kasultanan Yogyakarta pasca perjanjian Giyanti tahun 1755-1830; (2) untuk menganalisis dinamika Kasultanan Yogyakarta pasca perjanjian Giyanti tahun 1755-1830 baik dalam bidang politik, agama maupun dalam bidang kebudayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu (Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi).

Kesimpulan dari hasil penelitian: (1) dinamika Kasultanan Ngayogyakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830 sangat terlihat jelas, karena adanya pengaruh dari luar yakni karena campur tangan VOC sehingga menyebabkan banyak perubahan dalam bidang politik, agama maupun kebudayaan. Selain perubahan, Kasultanan Ngayogyakarta mengalami perkembangan pesat dalam bidang militer pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II; (2) dinamika Kasunanan Surakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830 terlihat dari perkembangan pesat dalam bidang agama dan kebudayaan. Perubahan pemerintahan di Kasunanan Surakarta selain karena pengaruh VOC, juga sempat mendapat pengaruh dari Inggris yakni pada masa pemerintahan Pakubuwono IV.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk berbagai pihak diantaranya: (1) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar mengenai sejarah dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca Perjanjian Giyanti; (2) bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan mengembangkan penelitian mengenai dinamika Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pasca Perjanjian Giyanti dalam sejarah bangsa Indonesia lainnya;

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karuna-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu pengetahuan sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D., selaku rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafiq, M. Sc. Ph. D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sukidin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember yang telah memberikan arahan, dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Sri Handayani, M.M., selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Sumarjono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya guna memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku Dosen Penguji I dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa, Drs. Sumarno, M.Pd., selaku Dosen Penguji II terima kasih atas kritik, daran, dan masukannya;
7. Bapak/ibu Muhammad Jayus dan Samiyati serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan serta do'anya demi terselesaikannya skripsi ini;
8. Rekan kerja sekaligus sahabatku Nana, Quraisyi, Ulum dan Dila Isni, Rama, Agus al-Fauzi, Fajar Harianto, Sungkar, dan Guruh yang telah memberi dorongan dan semangat;

9. Teman-temanku Historica'12 yang telah memberikan semangat dan bantuannya guna terselesaikannya skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Heuristik.....	16
3.2 Kritik.....	17
3.3 Interpretasi.....	18
3.4 Historiografi.....	19
BAB 4. DINAMIKA KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PASCA PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755-1830	21
4.1 Latar Belakang Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	21
4.1.1 Asal Usul Nama Yogyakarta	21
4.1.2 Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.....	22
4.2 DINAMIKA POLITIK KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830.....	23
4.2.1 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I.	23
4.2.2 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II.....	27
4.2.3 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono III.....	34
4.2.4 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IV.....	36
4.2.5 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V.....	37
4.3 DINAMIKA KEAGAMAAN KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830	39

4.3.1 Sultan Hamengkubuwono I Mendirikan Sekolah Tamanan...	40
4.3.2 Sultan Hamengkubuwono I Mendirikan Masjid Keprabon (Masjid Gedhe Kauman).....	41
4.4 DINAMIKA BUDAYA KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830.....	42
4.4.1 Perkembangan Budaya Kasultanan Ngayogyakarta pada Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I	43
4.4.2 Perkembangan Budaya Kasultanan Ngayogyakarta pada Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II	44
BAB 5. DINAMIKA KASUNANAN SURAKARTA PASCA PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755-1830	46
5.1 Latar Belakang Berdirinya Kasunanan Surakarta.....	46
5.1.1 Asal Usul Nama Surakarta	46
5.2 DINAMIKA POLITIK KASUNANAN SURAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830.....	48
5.2.1 Pemerintahan Pakubuwono III.....	48
5.2.2 Pemerintahan Pakubuwono IV.....	50
5.2.3 Pemerintahan Pakubuwono V.....	54
5.2.4 Pemerintahan Pakubuwono VI.....	55
5.2 DINAMIKA AGAMA DAN KEBUDAYAAN KASUNANAN SURAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830.....	58
5.2.1 Sikap Keagamaan Masyarakat Keraton.....	58
5.2.2 Serat Centhini: Jejak Syariah di Keraton Surakarta	61
5.2.3 Serat Cabolek: Cerminan Sikap Raja dan Priyayi Keraton Dalam Memegang Teguh Agama Islam	64
5.2.4 Paku Buawa IV dan Islam.....	66
5.2.5 Peristiwa Pakepung	67
BAB 6.PENUTUP.....	70
6.1 Kesimpulan	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

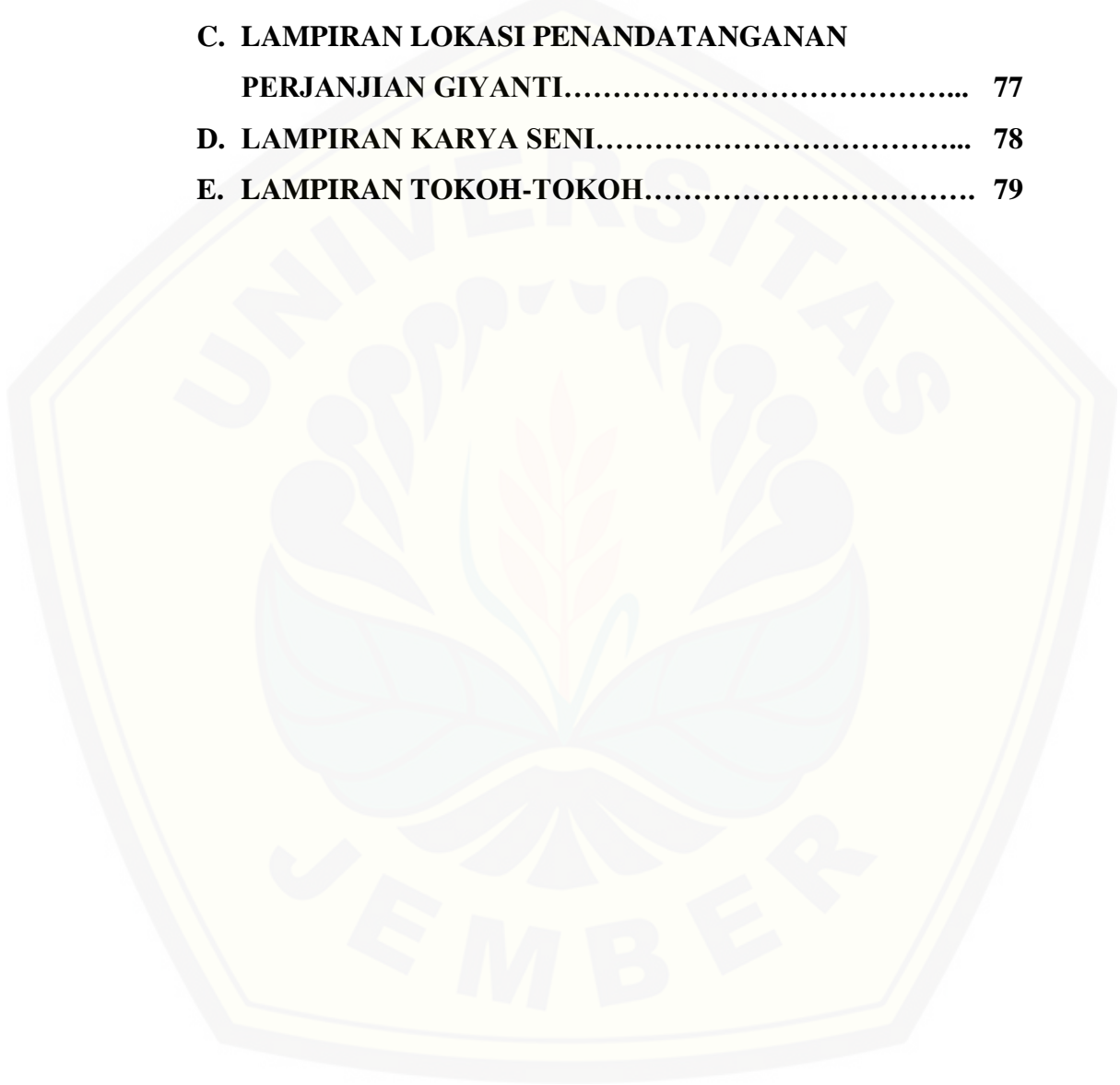
Halaman

5.1	Pembagian Wilayah Kasunanan Surakarta dan Puri Mangkunegaran Pasca Perjanjian Salatiga.....	49
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. LAMPIRAN MATRIKS PENELITIAN.....	75
B. LAMPIRAN PETA.....	76
C. LAMPIRAN LOKASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN GIYANTI.....	77
D. LAMPIRAN KARYA SENI.....	78
E. LAMPIRAN TOKOH-TOKOH.....	79





BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan, yang meliputi : (1) latar belakang; (2) penegasan judul; (3) ruang lingkup penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; (6) manfaat penelitian. Berikut akan dipaparkan masing-masing.

1.1 Latar Belakang

Kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 1586. Kerajaan Mataram ini awalnya hanyalah sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Setelah Pajang runtuh, Sutawijaya mendeklarasikan Kerajaan Mataram. Deklarasi Kerajaan Mataram Islam ini bermula setelah Sutawijaya berhasil membunuh Sultan Pajang, Arya Pangiri. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, tahta Pajang yang seharusnya jatuh kepada Pangeran Benawa sebagai putra Mahkota Pajang, direbut oleh Arya Pangiri. Tidak terima atas perlakuan Arya Pangiri yang merebut tahta sekaligus membunuh putra mahkota Pajang, Sutawijaya melancarkan Serangan ke Pajang dan berhasil merebut kembali tahta Pajang. Tahta Kerajaan Pajang itu pun dapat diselamatkan oleh Sutawijaya dengan memindahkannya ke Mataram. Sutawijaya mengganti nama Kerajaan Pajang dengan kerajaan baru bernama Mataram (Abimanyu, 2015:19).

Sekilas dapat diketahui bahwa Kerajaan Mataram Islam tidak bisa dilepaskan dari dua kerajaan sebelumnya, Demak dan Pajang. Dua kerajaan Islam ini merupakan pewaris kerajaan Majapahit. Oleh karena itu Kerajaan Mataram Islam juga merupakan pewaris tahta kerajaan Majapahit, dan raja-raja Mataram adalah keturunan dari raja-raja Majapahit.

Dinamika pentas politik tanah Jawa, kelahiran Kerajaan Mataram Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Sejak awal berdirinya, Mataram mengklaim dirinya sebagai satu-satunya kerajaan yang sah di seluruh Jawa. Dengan klaim itu, maka tidak mengherankan bila ekspansi teritorialnya, khususnya di wilayah-wilayah pesisir dimana ulama menjadi penguasa sekaligus

pedagang, merupakan perhatian utama para raja Mataram. Hampir semua wilayah Jawa bagian tengah dan timur tunduk dibawah kekuasaan Mataram, kecuali Blambangan yang tetap bertahan dan belum memeluk agama Islam seperti yang dicita-citakan Sutawijaya (Jajat, 2013:21).

Mataram yang tidak berhasil menaklukkan Blambangan, namun Kerajaan Mataram Islam pada masa keemasannya pernah menyatukan seluruh tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura, dibawah kekuasaannya. Ketika kolonialisme Barat (dalam hal ini VOC) mulai menginvasi Nusantara, tepatnya Jawa Barat, raja-raja Mataram Islam juga melawan dan memerangi VOC yang berpusat di Batavia (Jakarta sekarang). VOC masuk ke Batavia pada tahun 1619 setelah berhasil merebut wilayah Jayakarta dari Kesultanan Banten. Jayakarta merupakan wilayah di bagian barat pulau Jawa yang belum ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam (Abimanyu, 2015:22).

Mataram yang sempat menentang keras pendudukan VOC, akhirnya harus menerima bantuan VOC pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya. Terpecahnya kerajaan Mataram menjadi dua juga tidak lepas dari peran serta VOC, dan VOC adalah pihak yang paling diuntungkan dengan runtuhnya Mataram tersebut. Dalam hal ini, VOC menerapkan perjanjian Giyanti dalam upaya untuk memecah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua.

Kerajaan Mataram merupakan suatu kerajaan yang sangat kuat kekuasaannya atas Pulau Jawa sebelum mengalami perpecahan dalam persetujuan Giyanti pada 13 Februari 1755. Sebagai contoh adalah pada masa Sultan Agung. Wawasan politik Sultan Agung sangat luas dan jauh ke depan. Perekonomian pun maju pesat baik dari sektor agraris maupun maritim. Kejayaan Mataram dalam sektor maritim terbukti dari upaya serangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia melalui Pantai Utara Jawa. Sultan Agung menyerang VOC di Batavia hingga dua kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung menjadi sosok yang diagungkan oleh raja-raja penerus dinasti Mataram, diantaranya adalah Sri Sultan HB IX yang bertahta di Kasultanan Yogyakarta (Yahya, 1995:25-26).

Kejayaan Mataram yang diusahakan oleh Sultan Agung kini telah memudar. Mataram terpecah menjadi dua bagian yang kemudian pada saatnya

nanti juga terpecah lagi menjadi empat bagian (Paku Alaman dan Mangkunegaraan). Terpecahnya kerajaan besar ini tentunya akibat hausnya penguasa akan kekuasaan serta adanya politik bangsa Belanda (VOC) untuk menguasai Mataram. Dengan strategi *divide et impera* atau dengan kata lain memecah belah serta mengadu domba, membuat VOC mudah mencapai tujuannya.

Sekitar tahun 1745, terjadilah pemberontakan di Kerajaan Mataram yang dilakukan oleh Mas Said dan Martopuro. Paku Buwono II menjanjikan akan memberikan daerah Sukawati (wilayah Sragen sekarang) bagi yang mampu menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian Pangeran Mangkubumi bersedia memadamkan pemberontakan itu. Pangeran Mangkubumi adalah putera Prabu Amangkurat IV dengan permaisuri yang kedua (Ratu Tejawati), sedangkan penguasa Mataram waktu itu adalah putera Amangkurat IV dari permaisuri yang pertama (Ratu Kencana) yang setelah naik tahta bergelar Paku Buwono II (Kartodirjo, 1987: 106).

Setelah Pangeran Mangkubumi menjalankan tugasnya, ternyata Paku Buwono II mengingkari janjinya. Dengan adanya hal ini menyebabkan Pangeran Mangkubumi bersama Mas Said berbalik melawan Paku Buwono II. Perselisihan ini berlangsung bertahun-tahun hingga Paku Buwono II wafat karena sakit keras. Sebelum wafat, sang raja telah mengadakan perjanjian dengan VOC bahwa Kerajaan Mataram dititipkan kepada VOC untuk mengatur warisan kepada anak keturunan Raja agar tidak terjadi perselisihan. Dengan adanya hal ini seolah kekuasaan Mataram kini berada di tangan VOC, meski Putera Mahkota telah dinobatkan sebagai raja dengan gelar Paku Buwono III (Soedarisman, 1985: 147-148).

Pada tahun 1755 pihak VOC menyadari betapa sukarnya mematahkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said serta betapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk memerangi pemberontakan tersebut. VOC mendekati Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan perundingan perdamaian tanpa Mas Said. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah Perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, yang isinya antara lain, bahwa

Pangeran Mangkubumi akan diberi sebagian daerah Mataram dan bahwa bangsawan tersebut diakui sebagai raja di Yogyakarta dengan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I (Kartodirjo, 1987:107).

Peristiwa pasca Perjanjian Giyanti 1755 M, merupakan suatu fenomena pada masa perjalanan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Walaupun pada dasarnya peristiwa-peristiwa itu sudah dimulai pada masa Amangkurat I, namun kejadian yang hampir memporak porandakan wilayah dan pembunuhan secara besar-besaran berkejolak pada masa pakubuwono II 1740 M. Dalam keadaan sulit, Pakubuwono II sering kali tidak mampu mengambil sikap dan keputusan yang tegas. Ketika terjadi peristiwa geger Pacinan 1740-1746 M, sikap *diskriminatif* orang-orang Belanda pada waktu itu, menimbulkan pemberontakan orang-orang Cina secara besar-besaran. Pergolakan politik semakin meningkat dengan munculnya para pemberontak yang dipimpin Mas Garendi untuk menghancurkan Kerajaan Kartasutra (Anton, 2006:6).

Perjanjian Giyanti, melatar belakangi pecahnya dinasti Mataram. Berawal dari Pangeran Mangkubumi yang menuntut janji Pakubuwono II, bahwa ia akan menyerahkan 3000 cacah tanah di Sukowati apabila berhasil meredam pemberontakan Pangeran Sambernyawa. Akhirnya Mataram harus dipecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat melalui perjanjian Giyanti (Cribb, 2004:266).

Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh Sunan Pakubuwana III), dan pihak pemberontak dari kelompok Pangeran Mangkubumi yang menjadi solusi bagi salah satu kerusuhan yang terus terjadi di Mataram. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai memudarnya Kerajaan Mataram. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti (ejaan Belanda, sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo), di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah.

Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di

Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.

Peta pembagian Mataram setelah Perjanjian Giyanti dan didirikannya Mangkunagaran pada tahun 1757 menurut dokumen register harian N. Hartingh (Gubernur VOC untuk Jawa Utara), pada tanggal 10 September 1754 N. Hartingh berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada 22 September 1754.

Pada hari berikutnya diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Hartingh didampingi Breton, Kapten Donkel, dan sekretaris Fockens. Yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram. N. Hartingh menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi menyatakan di Cirebon ada lebih dari satu Sultan. Hartingh menawarkan Mataram sebelah timur diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, usul ini ditolak sang Pangeran Mangkubumi (Mastingah, 2010:3).

Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan diantara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji maka pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sunan, dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai oleh beliau. Mangkubumi berkeberatan melepas gelar Sunan karena sejak 5 tahun lalu diakui rakyat sebagai Sunan. (Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan [Yang Dipertuan] atas kerajaan Mataram ketika Paku Buwono II wafat di daerah Kabanaran, bersamaan VOC melantik Adipati Anom menjadi Paku Buwono III).

Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah Kerajaan.

Daerah Pantai Utara Jawa (orang Jawa sering menyebutnya dengan daerah pesisiran) yang telah diserahkan pada VOC (orang Jawa sering menyebut dengan Kumpeni) tetap dikuasai VOC dan ganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi (Abimanyu, 2015:139).

Pangeran Mangkubumi memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepakatan tersebut kemudian disampaikan pada Paku Buwono III. Pada 4 November tahun 1754, Paku Buwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mossel atas persetujuan beliau dari hasil perundingan N. Hartingh (Gubernur Jawa Utara) dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan 22-23 September 1754 dan surat persetujuan Paku Buwono III maka pada 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian di Giyanti (Purwadi, 2015:6).

Penelitian ini lebih difokuskan kepada peristiwa yang terjadi pasca Perjanjian Giyanti. Ketertarikan penulis meneliti dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca perjanjian Giyanti tahun 1755-1830 karena pada periode ini terjadi dua peristiwa yang sangat penting untuk dibahas yakni perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757 dan perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Maka dari itu penelitian ini berjudul **“Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830”**

1.2 Penegasan Judul

Penegasan pengertian judul ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang telah dikemukakan. penulis merasa sangat perlu untuk memberikan penegasan pengertian judul yaitu “Dinamika Kerajaan Islam Mataram Pasca Perjanjian Giyanti 1755”

Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan (Slamet Santosa, 2009:5)

Dinamika kelompok sosial adalah perubahan dan perkembangan suatu kelompok yang juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif serta kemungkinan terjadinya antagonisme antar kelompok (Soerjono Soekanto, 2005:163)

Kerajaan dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan di suatu wilayah dan mempunyai rakyat untuk diperintah yang dikepalai oleh seorang raja atau wilayah kekuasaan seorang raja (Eko Sujatmiko, 2014:14)

Giyanti (ejaan Belanda, sekarang berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar) adalah nama Desa yang merupakan lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti (Purwadi, 2015:29)

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan “Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti 1755-1830” adalah serangkaian perubahan maupun perkembangan kondisi kehidupan yang terjadi secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain pada kelompok masyarakat di wilayah Kerajaan Mataram Islam setelah diadakannya sebuah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755-1830 M baik di bidang politik, agama dan sosial budaya.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian sangat penting ditentukan dengan maksud untuk membatasi dan mengerucutkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pembatasan ruang lingkup akan menjadi sangat penting agar bisa terfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Ruang lingkup temporal (Waktu) penelitian ini lebih ditekankan pada kurun waktu 1755-1830. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pasca perjanjian Giyanti adalah terjadinya perjanjian Salatiga yang membagi Kasunanan Surakarta menjadi dua dan terjadinya perang Diponegoro. Penetapan ruang lingkup tidak bersifat mutlak akan tetapi fleksibel karena tidak menutup kemungkinan peneliti menyinggung beberapa kejadian yang terjadi sebelum tahun 1755 maupun sesudah tahun 1830. Dimana pada tahun 1755 terjadi peristiwa Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua (Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta). Pada tahun 1830 merupakan berakhirnya perang atau perlawanan pangeran Diponegoro. Seluruh daerah Yogyakarta dan Surakarta

dirampas Belanda. Pada tanggal 27 September 1830, Perjanjian Klaten menentukan tapal yang tetap antara Surakarta dan Yogyakarta dan membagi secara permanen Kerajaan Mataram Islam.

Ruang lingkup tempat (spasial) peneliti lebih memfokuskan pada lokasi pecahan Kerajaan Mataram Islam yakni Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Ruang lingkup materi mengenai perubahan dan perkembangan serta pasang surut kondisi masyarakat yang terjadi di wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta berdasarkan raja-raja yang pernah memerintah baik dalam bidang politik, agama dan kebudayaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah.

- 1) Bagaimana dinamika Kasultanan Ngayogyakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830?
- 2) Bagaimana dinamika Kasunanan Surakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

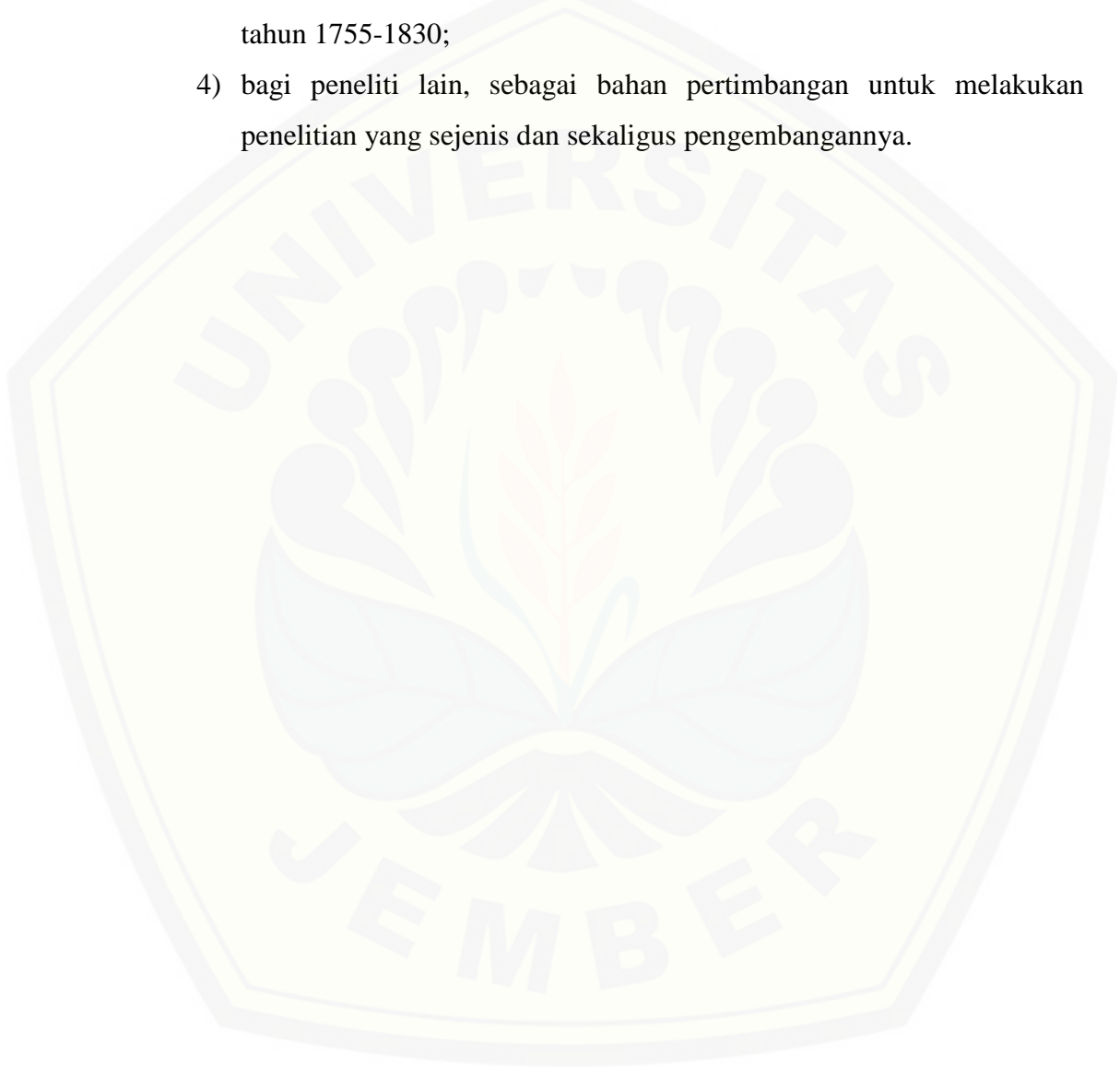
- 1) Untuk menganalisis dinamika Kasultanan Ngayogyakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830.
- 2) Untuk menganalisis dinamika Kasunanan Surakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, dapat mengetahui secara jelas dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830;

- 2) bagi alamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi;
- 3) bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan memahami mengenai dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan sebuah pembahasan yang lebih menekankan pada upaya memposisikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan hasil-hasil terdahulu mencapai tema yang sama. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Berbagai kajian tentang teori-teori, pendekatan-pendekatan dan penelitian terdahulu diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan skripsi. Adapun kajian tentang Dinamika Kerajaan Islam Mataram Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830, yang digunakan sebagai rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Buku yang pertama adalah buku yang berjudul "*Kitab Terlengkap Sejarah Mataram; Seluk Beluk Berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta*", yang ditulis oleh Soedjipto Abimanyu (2015:142-146). Buku ini membahas lengkap tentang Kerajaan Islam Mataram. Mulai dari awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam, pecahnya Kerajaan Mataram Islam setelah adanya perjanjian Giyanti, sejarah dan deskripsi lengkap Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Tahun 1558, peristiwa terpenting dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam terjadi pada tahun ini, ketika Ki Ageng Pemanahan dihadiahi wilayah Mataram oleh Sultan Pajang, Jaka Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya, sebagai imbalan karena telah memenangkan sayembara melawan Arya Penangsang. Bermula dari hadiah wilayah yang masih berupa alas (hutan) Mentaok inilah, kerajaan Mataram Islam lahir. Tahun 1755, terjadi peristiwa penting yang menjadi cikal bakal pecahnya Mataram menjadi dua kerajaan, yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Dua pecahan Mataram tersebut adakah Kesunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Buku yang berjudul "*Perjanjian Giyanti; Strategi Politik Teritorial untuk Mewujudkan Perdamaian di Kraton Mataram*", yang ditulis oleh Purwadi dan Endang Waryanti (2015), secara khusus membahas detail tentang perjanjian Giyanti sampai terjadinya perjanjian Salatiga. Mulai dari penyebab terjadinya perjanjian Giyanti, lokasi perjanjian giyanti hingga tokoh utama dalam perjanjian

Giyanti. Desa Giyanti Jantiharjo Tegal gedhe Karanganyar dipilih Sunan Paku Buwana III sebagai tempat perjanjian penting. Sri Susuhanan Paku Buwana III berusaha untuk menghentikan peperangan saudara, dengan alasan bahwa peperangan yang terjadi mengakibatkan kerusakan dan penderitaan rakyat. Pikiran itu diterima baik, dan pada hari Kamis Kliwon tanggal 29 Rabiulakhir 1680 atau 13 Februari 1755, perjanjian penghentian peperangan ditandatangani. Perjanjian itu disebut “Perjanjian Giyanti” atau “Palihan Nagari”.

Ahmad Sarwono bin Zahir (2015:16-18) dalam bukunya yang berjudul *“Sabda Raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa”* menjelaskan tentang sejarah kerajaan mataram, bedirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan raja-raja penerus Kasultanan Ngayogyakarta. Dalam buku ini secara khusus membahas tentang sejarah Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti 1755 M, Mataram terbelah dua, yakni dengan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kasultanan Ngayogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi berbekal semangat berdaulat menyatukan Jawa sebagaimana sudah dirintis Sultan Agung Mataram dan terlepas dari campur tangan penjajah Belanda. Ketika penjajahan Belanda dianggap telah mengambil kekuasaan Mataram setelah wafatnya Raja Mataram Pakubuwana II tahun 1749 M, maka Pangeran Mangkubumi bersama Raden Mas Said alias Pangeran Sember Nyawa mengangkat senjata melawan Belanda. Dalam peperangan tersebut, Pangeran Mangkubumi mendirikan langgar-langgar atau mushalla di pos-pos pasukannya di pedesaan. Langgar tersebut digunakan untuk shalat berjamaah juga untuk menshalatkan para syuhada yang gugur dalam perjuangan. Setelah perjanjian damai di Giyanti 1755 M, Ia kemudian mendirikan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dan menjadi raja pertama yang bergelar *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Khalifatullah Ngabdurahman Sayidin Panatagama Inkgang Jumeneng Ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat Inkgang Jumeneng Sepisan*.

Mas said sebagai pihak yang terlibat dalam pergolakan ternyata dapat diisolasi oleh VOC, bahkan terbentuk persekutuan yang menghancurkan gerakannya. Perang gerilya yang dilakukan mulai menyempit daerahnya, akhirnya

berbaris di daerah Nglaroh, Keduwang, dan Samboyan (sekarang kabupaten Wonogiri). Mulai disadari oleh Mas Said bahwa jalan perang tidak mungkin lagi memberi penyelesaian permasalahan sekitar perebutan tahta Mataram. Yang menjadi tuntutan nya ialah kedudukan yang sejajar dengan Paku Buwana III dan Hamengku Buwono I. Gerak siasat Mas Said untuk bersedia berunding dengan Kumpeni ternyata efektif karena Kumpeni yang memegang kunci dalam percaturan politik di Jawa. Ternyata strateginya sama dengan yang digunakan dalam menghadapi Perjanjian Giyanti. Baik Paku Buwana III maupun Hamengku Buwono I dalam perundingan antara VOC dan Mas Said bukan lagi menjadi faktor pokok dalam perhitungan. Berhasillah Mas Said dalam tuntutan nya untuk memperoleh kedudukan otonom dengan wilayah tersendiri. Dalam Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 secara resmi diakuinya Mas Said sebagai Mangkunegara I. Seperti itulah gambaran buku *“Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900”* karya Sartono Kartodirdjo (1987:234). Buku ini dirasa sangat cocok untuk dijadikan penambah referensi dan sebagai sumber pembandingan penelitian tentang dinamika Kerajaan Mataram Islam, karena di dalam buku ini sudah banyak menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah adanya Perjanjian Giyanti.

Buku karya Dwi Ratna Nurhajarini Dkk (1999:142), yang berjudul *“Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta”* menjelaskan perubahan sikap Kasunanan Surakarta terhadap Mangkunegaran terjadi ketika Surakarta diperintah oleh Paku Buwana IX. Walaupun Mangkunegaran pada waktu itu masih sebagai *vassal* kasunanan, namun hubungannya sangat akrab. Keakraban itu terjalin antara lain dengan adanya kekerabatan dengan trah Hadiwijayan. Permaisuri Sunan adalah dari K.P.A. Hadiwijaya II. Sedangkan K.P.A. Hadiwijaya II adalah kakak dari Mangkunegara IV. Mangkunegara IV sangat bangga terhadap kedudukan keponakannya. Apalagi saat keponakannya yang menjadi permaisuri Paku Buwana IX melahirkan putra laki-laki, seorang calon putra mahkota, yang selanjutnya akan menaiki tahta Kerajaan Surakarta.

Buku selanjutnya adalah buku karya Saleh As'ad Djamhari (2014:23-29) yang berjudul *“Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-*

1830” menjelaskan bahwa Diponegoro mulai muncul di panggung politik kesultanan Yogyakarta pada 1812 ketika membantu ayahnya (putra mahkota) Pangeran Adipati Mangkunagoro, dalam konflik melawan kakeknya Sultan Hamengkubuwono II (Sultan Sepuh). Setelah ayahnya diangkat menjadi Sultan, ia kembali menghilang dan jarang muncul didepan publik. Diponegoro gerah melihat ulah Belanda dan gaya hidup ala Barat di Kesultanan Yogyakarta, akhirnya Diponegoro menyingkir. Pada tanggal 21 Juli 1825 Residen Yogyakarta Simssaert memerintahkan pasukannya menyerang markas Diponegoro di Tegalrejo. Tiga minggu kemudian, Diponegoro membalas dan menyerang Yogyakarta, perang Jawa akhirnya pecah.

Peneliti menemukan beberapa penelitian sejenis yang dijadikan referensi diantaranya adalah menurut hasil penelitian Mastingah (2010:11-12) yang berjudul “*Sekitar Perjanjian Giyanti 1755 M*” menjelaskan bahwa terbentuknya peristiwa menjelang Perjanjian Giyanti 1755, merupakan suatu fenomena pada masa perjalanan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam pada waktu itu kurang memiliki kekuatan militer yang tangguh dan permanen, Mataram lebih bersandar pada kekuatan aliansinya. Pemberontakan yang dilakukan oleh Mangkubumi dan Mas Said menimbulkan kemiskinan penduduk akibat peperangan. Pada akhirnya ketika kekuasaan wilayah hampir dikuasai oleh Mangkubumi, terjadilah perpecahan antara Mas Said dan Mangkubumi pada tahun 1752 M. Perpecahan tersebut, diambil kesempatan oleh VOC yang diwakili oleh Nicholaas Hartingh dengan mengadakan sebuah perundingan perdamaian. Hasil dari perundingan antara Mangkubumi dengan Nicholaas Hartingh tersebut, menghasilkan sebuah Perjanjian Giyanti 1755 M, yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, dimana penelitian ini membahas tentang dinamika dari dua Kerajaan hasil pecahan Kerajaan Mataram Islam, yakni Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta ditinjau dalam bidang politik, agama dan budaya raja-raja yang memerintah di Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755-1830 M. Sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang peristiwa yang terjadi menjelang

Perjanjian Giyanti. Selain itu dalam penelitian ini menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kurun waktu antara tahun 1755-1830 M yang terjadi di Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik. Menurut Maurice Duverger (1985), mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan pemerintahan, otoritas, komando dalam semua masyarakat, yang bukan saja masyarakat nasional, tetapi juga dalam masyarakat lokal dan internasional.

Pendekatan sosiologi politik dianggap oleh peneliti sebagai yang tepat untuk menganalisa permasalahan terkait perbedaan pemerintahan yang diterapkan di Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755-1830 M. Hal ini disebabkan karena menurut peneliti pemerintahan raja-raja Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755-1830 M banyak dipengaruhi oleh pemerintah kolonial dalam menangani hal hal yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan serta pengambilan keputusan untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologi politik digunakan sebagai salah satu pendekatan yang berhubungan dengan pemerintahan dari kedua kerajaan tersebut. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik dan teori struktural fungsional.

Menurut Ralf Dahrendorf (1986:25) asumsi dari teori konflik adalah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan kepentingan masyarakat.

Menurut George Ritzer (1985:25) asumsi dari teori struktural fungsional adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berlaku fungsional terhadap yang struktur lainnya. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu akan hilang atau tergantikan dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang peneliti kaji dimana perseteruan di Kerajaan Mataram tak bisa dilepaskan dari

taktik adu domba penjajah Belanda. Penjajah Belanda mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram dengan menawarkan bantuan persenjataan bagi pihak yang bisa menguntungkan Belanda. Tahta Raja Mataram menjadi incaran para pewarisnya. Kerajaan Mataram yang awalnya besar, namun akhirnya mulai memudar dan terpecah menjadi Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, akibat perebutan tahta.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dikarenakan data-data yang dipergunakan adalah sejarah mengenai dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottschalk, 1985:32). Metode penelitian sejarah adalah penelitian yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati terhadap validitas dari sumber-sumber sejarah serta interpretasi dari sumber keterangan-keterangan tersebut (Iqbal, 2002:22). Kesimpulan yang dapat diambil peneliti dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa metode sejarah merupakan proses penelitian terhadap sumber-sumber masa lampau yang digunakan secara kritis-analitis dan sistematis dengan akhir kontruksi imajinasi yang disajikan secara tertulis. Metode sejarah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

3.1 Heuristik

Pengumpulan sumber (Heuristik) dilakukan setelah peneliti menentukan topik yang akan dikaji peneliti dalam penyusunan skripsi. Sumber-sumber yang peneliti kumpulkan yaitu berupa buku-buku, tesis, skripsi, dan artikel yang didalamnya terdapat tulisan mengenai peristiwa yang akan peneliti kaji dalam skripsi, yaitu Kerajaan Mataram Islam dan peristiwa pasca Perjanjian Giyanti 1755 M. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan bukti-bukti tertulis dari tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi yang dihasilkan oleh orang yang terlibat langsung atau hadir pada peristiwa tersebut. Sedangkan ketika melakukan pengumpulan data atau sumber, peneliti tidak menemukan sumber primer.

Peneliti menggunakan sumber sekunder yang berupa buku. Adapun sumber sekunder yang peneliti gunakan ketika melakukan pengumpulan data diantaranya adalah buku karya Soedjipto Abimanyu dengan judul “*Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*”, buku karya Dr. Purwadi, M.Hum dan Dra. Endang Waryanti, M.Pd dengan judul “*Perjanjian Giyanti*”, buku karya Dwi Ratna Nurhajarini Dkk dengan judul “*Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*”, buku karya Ahmad Sarwono bin Zahir dengan judul “*Sabda raja HB X Dalam Timbangan Revolusi Karakter Istimewa*”, buku karya Sartono Kartodirdjo yang berjudul “*Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*”, buku karya Saleh As’ad Djamhari dengan judul “*Strategi Menjinakkan Diponegoro*”

Peneliti juga mendapatkan sumber sekunder berupa penelitian milik Mastingah (1) *Sekitar Perjanjian Giyanti 1755 M*, penelitian milik Indarti (2) *Perjuangan Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said) dalam Sejarah Berdirinya Kadipaten Mangkunegaran tahun 1741-1757*. Sumber-sumber tersebut di dapatkan dari perpustakaan daerah Jember, Toko-toko buku baik secara langsung maupun online.

3.2 Kritik

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ini adalah kritik. Menurut Gottschalk dalam Pranoto (2010:35) kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian. Setelah penulis mengumpulkan sumber-sumber, maka dilakukalah kritik, baik kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah sumber yang digunakan dalam penelitian ini asli atau tidak. Langkah yang dilakukan adalah dengan melihat sampul, tahun terbit, pengarang, judul dan latar belakang.

Setelah kritik ekstern dilakukan selanjutnya adalah kritik intern. Kritik intern dilakukan agar mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini (kritik intern) dilakukan penilaian secara kritis sumber-sumber yang telah terkumpul. Untuk sumber-sumber yang berupa dokumen, buku, artikel dan surat kabar penulis melakukan perbandingan antar satu sumber dengan sumber lainnya, sehingga bisa memposisikan se-objektif mungkin tanpa ada rasa subjektif

dan tendensi terhadap satu pihak dengan pihak lainnya, serta dengan adanya kritik intern ini bisa mengetahui apakah sumber yang digunakan tersebut sudah bisa menjadi fakta sejarah.

Kritik eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek dari luar sumber. Sebuah dokumen yang berfungsi sebagai sumber sejarah dianggap otentik atau asli jika benar-benar hasil karya atau benda peninggalan dari pemiliknya atau pembuatnya. Sedangkan kritik internal mengacu pada kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Kritik intern mengacu pada kebenaran isi dari sumber-sumber sejarah. Kritik ekstern dan kritik intern dilakukan untuk menyeleksi data yang berasal dari sumber sejarah menjadi fakta sejarah.

Beberapa sumber yang telah dicantumkan di atas menurut peneliti semua sumber yang ada layak dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan semua sumber yang peneliti dapatkan di atas membahas mengenai rumusan masalah yang peneliti sajikan.

3.3 Interpretasi

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan interpretasi. Dalam tahapan interpretasi atau penafsiran peneliti mencoba melakukan tafsiran atau interpretasi seobjektif mungkin dengan selalu mencantumkan sumber yang peneliti gunakan. Data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Namun demikian, sejarah itu sendiri bukanlah kumpulan dari fakta, parade tokoh, kronologis peristiwa, atau deskripsi belaka yang apabila dibaca akan terasa kering karena kurang mempunyai makna.

Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. Dengan demikian, tidak hanya pertanyaan dimana, siapa, bilamana, dan apa yang perlu dijawab, tetapi juga yang berkenaan dengan kata mengapa dan apa jadinya.

Dalam tahapan interpretasi ini, peneliti melakukan dua hal, yaitu analisis dan sintesis (Pranoto, 2010:56). Pada tahapan analisis peneliti menguraikan bahasan yang akan dikaji peneliti. Peneliti mencoba menguraikan dinamika

Kerajaan Mataram Islam dari definisi hingga struktur sehingga dapat disimpulkan dan dibandingkan dinamika peristiwa yang terjadi di pemerintahan Kerajaan Mataram Islam sebelum dan sesudah diadakannya Perjanjian Giyanti. Kemudian tahap sintesis, dari uraian-uraian informasi peneliti mencoba menyatukan dan mengambil kesimpulan tentang dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca Perjanjian Giyanti.

Penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul untuk dirangkai dan dihubungkan menjadi suatu bentuk yang logis, rasional, objektif, dan kausalitas. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dipatkan oleh penulis akan dirangkai secara kronologis sehingga nantinya akan diperoleh suatu cerita sejarah yang logis dan sesuai realitas yang ada tentang perkembangan Kerajaan Mataram Islam pasca Perjanjian Giyanti.

3.4 Historiografi

Setelah melakukan proses analisis terhadap fakta-fakta yang ada, peneliti kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi. Historiografi merupakan proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian kedalam bentuk tulisan. Peneliti mencoba menyajikan hasil penelitian ini dengan gaya bahasa yang menarik dan komunikatif.

Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam prosedur penelitian. Historiografi atau laporan hasil penelitian merupakan puncak dari suatu prosedur penelitian sejarah. Setelah melakukan langkah heuristik, kritik, interpretasi seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh, disusun menjadi suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi dalam historiografi. Laporan ini disusun dengan sistematika yang telah baku dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

Historiografi sendiri merupakan kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data-data yang diperoleh dengan menempuh sebuah metode sejarah (Gottschalk, 1985:32). Historiografi yang dilakukan oleh peneliti adalah menuliskan cerita sejarah dengan tentang dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca perjanjian Giyanti 1755-1830 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas,

rasional, logis dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis dan dapat diyakini kebenarannya.

Penyajian tulisan sejarah ilmiah ini dalam bentuk karya ilmiah skripsi tersusun dalam tujuh bab. Bab 1 menyangkut perihal pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan pengertian judul, ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca perjanjian Giyanti 1755-1830 serta teori yang relevan terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian sejarah yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Dalam bab ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara-cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan data-data dan sumber sejarah, menganalisis data, dan merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh, logis dan rasional. Bab 4 menjelaskan mengenai dinamika Kasultanan Ngayogyakarta pasca Perjanjian Giyanti 1755-1830, Bab 5 akan memaparkan mengenai dinamika Kasunanan Surakarta pasca Perjanjian Giyanti 1755-1830 dan terakhir bab 6 yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi karya ilmiah skripsi ini dan beberapa saran-saran.

BAB 4. DINAMIKA KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PASCA PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755-1830

Kasultanan Ngayogyakarta hingga saat ini, ada sepuluh orang sultan yang berkuasa di Kasultanan Ngayogyakarta secara bergantian dan hierarki. Dinamika Kasultanan Yogyakarta pada tiap pemerintahan berbeda-beda, baik dalam bidang politik, agama dan sosial-budaya yang diterapkan oleh setiap raja-raja yang memerintah di Kasultanan Ngayogyakarta.

4.1 Latar Belakang Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Perjanjian Giyanti memutuskan untuk membagi kekuasaan Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dalam perjanjian itu, juga menetapkan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan di Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sekitar satu bulan setelah Perjanjian Giyanti, Sri Sultan Hamengkubuwono I yang pada saat itu tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang mendirikan sebuah keraton di pusat Kota Yogyakarta, yang kini menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta.

4.1.1 Asal Usul Nama Yogyakarta

Nama Yogyakarta yang digunakan untuk menyebut Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki sejarah sendiri. Konon, nama Yogyakarta sudah ada jauh sebelum Sultan Hamengkubuwono I mendirikan Kerajaan Yogyakarta. Nama Yogyakarta, yang kemudian diadopsi menjadi nama kerajaan oleh Sultan Hamengkubuwono I itu cikal bakalnya dapat dilacak kepada sultan kedua Kesunanan Kartasura, yakni Pangeran Puger alias Pakubuwono I.

Menurut Sukendra Martha, (kata Yogyakarta merupakan pergeseran lafal dari kata bahasa Jawa "*Ngayogyakarto*"). Kata Ngayogyakarto dibentuk oleh dua suku kata, yakni kata "*Ngayogy*" ("*ayogy*" atau "*ayody*") dan kata "*karta*". Kata *ayodya* memiliki arti "kedamaian" "pantas", "baik". Dengan makna ini, maka kata *ayodya* atau *ngayogy* diartikan "memiliki cita-cita yang baik". Kata *ayodya* juga merujuk pada sebuah kota bersejarah di India tempat asal wiracarita

Ramayana. Keraton Yogyakarta telah berupa dalem yang bernama Dalem Garjitawati yang kemudian dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwono II sebagai Dalem Ayogya. Dalem Ayogya inilah yang menjadi cikal bakal nama pertama (Yogya) dari digunakannya nama Yogyakarta. Kata kedua (karta) memiliki arti “aman”, “sejahtera”. Dengan demikian, kata *ngayogyakarta* berarti mencapai kesejahteraan bagi negeri dan rakyatnya.

Nama Yogyakarta kemudian dijadikan nama resmi bagi salah satu pecahan Kerajaan Mataram Islam, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampai saat ini, nama Yogyakarta tetap digunakan untuk menyebut bekas wilayah Kerajaan Mataram tersebut. Kata Yogyakarta sekarang digunakan untuk menyebut nama dari dua wilayah di Indonesia, yakni Kota Yogyakarta (dalam lingkup kecil) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (secara luas). Kota Yogyakarta adalah ibu kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan salah satu kota besar di pulau Jawa dan menjadi tempat kedudukan bagi Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam.

Menurut sejarahnya, Kerajaan Mataram Islam berlokasi di salah satu kecamatan di kota Yogyakarta, yakni kecamatan Kotagede. Setelah Mataram resmi terpecah pada tahun 1755, penerus dari pecahan Kerajaan Mataram ini masih bertempat di kota Yogyakarta. Hingga kini, penerus Kerajaan Mataram masih tetap eksis di Yogyakarta, yang pusat pemerintahannya berada di Keraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman.

4.1.2 Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Kasultanan Yogyakarta secara resmi berdiri pasca ditandatanganinya perjanjian Giyanti antara VOC, Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I), dan Pakubuwono III. Berdirinya kerajaan ini sekaligus mengakhiri perang suksesi Jawa III diantara para trah (keturunan) Mataram Islam yang saling berebut tahta Kerajaan Mataram. Lahir dari sebuah kesepakatan atau perjanjian, maka kedaulatan dan kekuasaan pemerintahannya diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik yang telah ditandatangani. Adapun pihak yang berkuasa atas kontrak politik tersebut dan sekaligus pembuat segala aturan yang berlaku adalah VOC.

Keraton Yogyakarta mempunyai luas wilayah 87.050 km² dan meliputi daerah Mataram asli seperti Kedu, Bagelan, Banjarnegara, sebagian Pajang, Pacitan, Madiun, Grobogan, dan Mojokerto. Semula tempat yang dipilih untuk mendirikan Keraton adalah *desa Telogo*, dimana baginda pernah mendirikan pesanggrahan yang diberi nama *Ngambar Ketawang*, tetapi kemudian baginda memutuskan untuk mendirikan Keraton di Hutan Garjitawati, dekat Desa Beringin dan Desa Pacetokan (Zahir, 2015:16). Dengan alasan daerah ini dianggap kurang memadai untuk membangun sebuah Keraton dengan bentengnya, maka aliran sungai Code dibelokkan sedikit ke timur dan aliran sungai Winanga sedikit dibelokkan ke barat (lihat lampiran halaman 82).

Kasultanan Yogyakarta menjadi kerajaan tersendiri dan bebas dari Surakarta, akan tetapi Kasultanan Yogyakarta masih berada dibawah kekuasaan dan pengawasan VOC. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti, yang menuntut para sultan tidak boleh mengangkat putra mahkota dan patih tanpa tanpa persetujuan dari pihak VOC. Kontrak politik terakhir antara VOC dengan bekas pecahan Mataram adalah tahun 1940, hal tersebut dikarenakan lima tahun setelahnya, Kasultanan Yogyakarta secara resmi bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah bergabung dengan NKRI, Kasultanan Yogyakarta (bersama Kadipaten Pakualaman) secara resmi dibubarkan dan diturunkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (setingkat provinsi) (Abimanyu, 2015:172).

4.2 DINAMIKA POLITIK KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830

Kebijakan politik yang diterapkan oleh setiap raja-raja yang memerintah di Kasultanan Ngayogyakarta berbeda-beda sehingga perkembangan, perubahan maupun keberlanjutan politik Kasultanan Ngayogyakarta pada tiap pemerintahan berbeda-beda.

4.2.1 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I.

Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah raja pertama Kasultanan Ngayogyakarta yang memerintah sejak 13 Februari 1755 sampai 24 Maret 1792. Sultan Hamengkubuwono I merupakan nama gelar yang dipakai oleh Raden Mas

Sujana, yakni sultan pertama Yogyakarta ketika mendeklarasikan berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan menjadi raja. Sebelum bergelar Sultan Hamengkubuwono I, ia telah menggunakan dua nama lain yakni Raden Mas Sujana dan Mangkubumi.

Sultan Hamengkubuwono I memiliki seorang kakak yang menjadi pewaris tahta kerajaan ayahnya (Amangkurat IV), yakni yang bergelar Pakubuwono II, raja terakhir Kasunanan Kartasura dan raja pertama Kasunanan Surakarta. Sultan Hamengkubuwono I berseberangan politik dengan Pakubuwono II. Salah satu penyebab perselisihan antara Hamengkubuwono I dan Pakubuwono II tidak lain adalah tahta kerajaan. Perselisihan dimulai dari sebuah peristiwa yang disebut Geger Pecinan, yaitu pemberontakan orang-orang Tiongkok di Batavia. Awalnya, Pakubuwono II bersama dengan Raden Mas Said menjadi pendukung pemberontak. Keduanya akhirnya berpisah ketika Pakubuwono II berbalik mendukung VOC dan melawan pemberontak. Sejak saat itu, Raden Mas Said berseberangan politik dengan Pakubuwono II (Abimanyu, 2015:175).

Raden Mas Said berhasil merebut Sukowati dari wilayah kekuasaan Kartasura dan berhasil menghancurkan istana Kartasura. Pakubuwono II akhirnya membangun istana baru di Surakarta. Ketika sudah menjadi raja di Kartasura, Pakubuwono II membuat sayembara barang siapa yang berhasil merebut tanah Sukowati dari tangan Raden Mas Said, akan diberi hadiah berupa tanah seluas 3.000 cacah. Sultan Hamengkubuwono I yang pada saat itu masih bernama Mangkubumi akhirnya mengikuti sayembara dan berhasil merebut Sukowati dari tangan Raden Mas Said sekaligus mengusirnya pada tahun 1746. Dengan demikian, Mangkubumi berhak atas tanah seluas 3.000 cacah yang dijanjikan oleh Pakubuwono II.

Pakubuwono II ternyata melanggar janji tidak memberikan tanah seluas 3.000 cacah kepada Mangkubumi sebagai hadiah sayembara. Penyebab Pakubuwono II melanggar janji karena hasutan dari Patih Pringgalaya yang menyuruh untuk membatalkan perjanjian sayembara dan membuat Mangkubumi marah terhadap Pakubuwono II.

Mangkubumi bersama dengan Raden Mas Said melakukan perlawanan terhadap Pakubuwono II yang didukung VOC. Perlawanan ini lebih kepada perang saudara, yang dikenal dengan nama Perang Suksesi Jawa III. Perang berlangsung sangat alot, dan Mangkubumi berhasil memenangkan setiap pertempuran. Karena sudah terdesak, pihak VOC membuat langkah perdamaian dengan memberikan sebagian wilayah Surakarta kepada Mangkubumi. Mangkubumi kemudian mendirikan Kasultanan Yogyakarta dan bergelar Sultan Hamengkubuwono I.

Dibawah kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I, Kasultanan Yogyakarta tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan kuat di masanya. Kebesaran dan kekuatan Kasultanan Yogyakarta mengalahkan Kasunanan Surakarta dan VOC di seluruh tanah Jawa. Hal tersebut yang membuat Sultan Hamengkubuwono I kembali berambisi untuk menyatukan kembali wilayah kerajaan leluhurnya, Mataram Islam. Sebelum memulai rencana untuk menyatukan kembali kerajaan Mataram Islam, terlebih dahulu Sultan Hamengkubuwono I membangun istana Keraton Yogyakarta.

Langkah pertama yang diambil oleh Sultan Hamengkubuwono I ketika mendapat wilayah kekuasaannya setelah perjanjian Giyanti adalah membangun keraton. Sultan Hamengkubuwono I segera memerintahkan membuka hutan Beringan. Di hutan tersebut, terdapat sebuah dusun yang menjadi cikal bakal dari Kasultanan Yogyakarta, yakni dusun Pacethokan. Dusun inilah yang dipilih oleh Sultan Hamengkubuwono I untuk mendirikan Keraton Yogyakarta.

Dusun Pacethokan terletak diantara dua sungai, yaitu Sungai Code (Kali Code) di sebelah timur dan Sungai Winongo (barat). Pembangunan keraton dipimpin langsung oleh Sultan Hamengkubuwono I yang dimulai pada tanggal 9 Oktober 1755. Keraton Yogyakarta sudah berdiri hanya sekitar satu tahun, dan Sultan Hamengkubuwono I menempati istana tersebut pada tanggal 7 Oktober 1756. Bangunan pertama yang digunakan adalah gedung sedahan. Pembangunan bagian-bagian keraton yang lainnya dilakukan secara bertahap, hal ini disebabkan oleh situasi keamanan yang belum stabil.

Setelah membangun Keraton Yogyakarta sebagai markas utama dari Kasultanan Ngayogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I dalam pemerintahannya juga sempat ingin meluaskan wilayah Kasultanan Yogyakarta. Surakarta merupakan target utama Sultan Hamengkubuwono I untuk meluaskan wilayah Kasultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I pernah melancarkan serangan untuk menyatukan kembali wilayah Mataram Islam yang terpecah belah. Cita-cita Sultan Hamengkubuwono I untuk menyatukan kembali wilayah kerajaan Mataram Islam yang terpecah mengalami kegagalan setelah Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono IV.

Hamengkubuwono I meskipun telah berjanji damai namun tetap saja berusaha ingin mengembalikan kerajaan warisan Sultan Agung menjadi utuh kembali. Surakarta memang dipimpin Pakubuwono III yang lemah namun mendapat perlindungan Belanda sehingga niat Hamengkubuwono I sulit diwujudkan, apalagi masih ada kekuatan ketiga yaitu Mangkunegoro I yang juga tidak senang dengan Kerajaan yang terpecah, sehingga cita-cita menyatukan kembali Mataram yang utuh bukan monopoli seorang saja.

Pada tahun 1790 Hamengkubuwono I dan Mangkunegara I kembali bekerja sama untuk pertama kalinya sejak zaman pemberontakan dulu. Mereka bersama VOC bergerak mengepung Pakubuwana IV di Surakarta karena Pakubuwono IV memiliki penasehat penasehat Spiritual yang membuat khawatir VOC. Pakubuwana IV akhirnya menyerah untuk membiarkan penasehat penasehat spiritualnya dibubarkan oleh VOC. Ini adalah kerja sama dalam kepentingan yang sama yaitu mencegah bersatunya penasehat spiritual dengan golongan Ningrat yang merupakan ancaman potensial pemberontakan kembali.

Hamengkubuwono I pernah berupaya agar putranya dikawinkan dengan putri Pakubuwono III, raja Surakarta dengan tujuan untuk bersatunya kembali Mataram namun gagal. Pakubuwono IV yang merupakan waris dari Pakubuwono III lahir untuk menggantikan ayahnya.

Kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I di Kasultanan Yogyakarta tidak bisa dikatakan gagal dikarenakan tidak berhasil menaklukkan Surakarta untuk menyatukan kembali wilayah Mataram Islam yang terpecah belah. Dibawah

kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I Kasultanan Yogyakarta mulai berkembang pesat dan mengalami perubahan pemerintahan dalam bidang politik karena pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I merupakan awal terpecahnya Kerajaan Mataram Islam. Salah satu perkembangan yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta adalah kekuatan prajurit yang dimiliki Kasultanan Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I jauh lebih besar daripada kekuatan VOC dan Surakarta di seluruh tanah Jawa. Sultan Hamengkubuwono I juga dianggap sebagai raja Yogyakarta terbesar kedua setelah Sultan Agung.

4.2.2 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II

Setelah Sultan Hamengkubuwono I wafat, pewaris tahta Kasultanan Yogyakarta jatuh kepada putranya yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II dilahirkan dengan nama asli Raden Mas Sundoro pada tanggal 7 Maret 1750. Sebutan lain untuk Sultan Hamengkubuwono II adalah Sultan Sepuh. Nama asli Sultan Hamengkubuwono II merujuk pada tempat kelahirannya, yakni di lereng Gunung Sindoro, Kedu Utara. Sultan Hamengkubuwono II dilahirkan ketika sang ayah sedang menjalani perang suksesi Jawa III melawan VOC dan Kasunanan Surakarta dibawah kekuasaan Pakubuwono III (Ricklefs, 1974:55).

Sultan Hamengkubuwono II dalam memimpin Kasultanan Yogyakarta sangat gigih menentang kolonial Belanda. Sejak naik tahta hingga akhir hayatnya, Sultan Hamengkubuwono II tidak pernah berkompromi dengan penjajah. Sultan Hamengkubuwono II dengan lantang menentang VOC dan antek-anteknya yang sudah lama menjajah tanah Jawa. Kegigihannya melawan VOC melebihi kegigihan sang ayah, Sultan Hamengkubuwono I.

Setelah memegang tampuk pemerintahan tahun 1792, Sultan Hamengkubuwono II terus menunjukkan tekadnya untuk menjunjung tinggi kebesaran tradisi dan kewibawaan Kasultanan Yogyakarta. Sikap Sultan Hamengkubuwono II ini menciptakan benturan dengan tuntutan dan kepentingan para penguasa kolonial yang ingin memaksakan kehendak terhadap raja-raja Jawa. Atas dasar hal tersebut, Sultan Hamengkubuwono II selalu melawan tekanan yang

dilakukan oleh pemerintah kolonial. Pihak VOC melakukan banyak cara untuk melengserkannya dari tahta Yogyakarta.

Sebagai konsekuensi dari sikap kerasnya terhadap VOC, Sultan Hamengkubuwono II mengalami dua kali penurunan tahta, yakni pada tahun 1811 oleh Dandles dan pada tahun 1812 oleh Raffles. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono II mengalami hukuman buang sebanyak tiga kali, yakni dibuang ke Penang pada tahun 1812, dibuang ke Ambon pada tahun 1817, dan dibuang ke Surabaya pada tahun 1825.

Pemerintah kolonial akhirnya mengakui kewibawaan Sultan Hamengkubuwono II yang terdesak sebagai akibat dari pecahnya perang Diponegoro. Sultan Hamengkubuwono II dibebaskan dari pembuangannya dan dilantik kembali menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II tetap tidak mau berkompromi dengan Belanda yang pada waktu itu tengah kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro. Hingga akhir hayatnya, Sultan Hamengkubuwono II tidak pernah mau bekerja sama dengan Belanda. Sultan Hamengkubuwono II duduk di tahta Kasultanan Yogyakarta tidak hanya satu kali, melainkan sebanyak tiga kali.

Periode pertama dari pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II berlangsung dari tanggal 2 April 1792. Sebagai raja kedua Kasultanan Yogyakarta yang baru dilantik, langkah pertama yang diambilnya dalam bidang politik adalah mengganti para pejabat senior yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan politiknya. Beberapa pejabat senior yang dipensiunkan oleh Sultan Hamengkubuwono II di masa-masa awal pemerintahannya, diantaranya Patih Danureja I yang digantikan cucunya dengan gelar Danureja II.

Selain mengganti para pejabat senior, kebijakan lain yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono II pada periode pertama pemerintahannya adalah menentang dan bersikap anti terhadap VOC. Sikap anti VOC Sultan Hamengkubuwono II melebihi sikap Sultan Hamengkubuwono I, berkali-kali Sultan Hamengkubuwono II melakukan perlawanan terhadap VOC. Puncak dari perlawanan itu membuahkan hasil dengan dibubarkannya VOC pada tahun 1799.

Belanda masih berkuasa di tanah Jawa walaupun VOC telah runtuh. Kekuasaan VOC digantikan oleh Hindia Belanda (Poesponegoro, 2008:52).

Pada periode pertama Sultan Hamengkubuwono II memerintah, tepatnya tahun 1808, Herman Willem Daendles datang ke Jawa sebagai pengganti dari Gubernur Jenderal VOC yang telah runtuh. Daendles adalah seorang anti feodalisme. Daendles mewakili Prancis dari kerajaan Belanda yang kala itu dipimpin oleh raja Louis, adik dari Napoleon yang menjadi raja Belanda.

Dalam pemerintahannya, Daendles bertindak sangat radikal terhadap raja-raja di Jawa, khususnya Surakarta dan Yogyakarta. Daendles menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan oleh raja-raja Jawa terhadap *minister* (istilah baru untuk residen), yaitu wakil-wakil Belanda yang ditempatkan di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa untuk mengawasi berbagai kegiatan raja. Keberadaan *minister* ini merupakan dampak dari perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang salah satu poinnya mengatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki otoritas penuh atas kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta.

Dalam aturan baru itu, Daendles menuntut agar wakil-wakilnya diperlakukan sama seperti raja. Mengenai aturan yang diterapkan oleh Daendles, sementara Yogyakarta dan Surakarta merespon dengan sikap berbeda. Pihak Surakarta yang waktu itu dipimpin Pakubuwono IV, justru menerima secara *taken for granted* aturan tersebut. Tidak demikian dengan pihak Yogyakarta, dibawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono II secara terang-terangan menolak aturan tersebut karena dianggap merendahkan derajat raja-raja di Jawa. Sultan Hamengkubuwono II menganggap aturan tersebut terlalu berlebihan dan melanggar kode etik serta tradisi kerajaannya. Sultan Hamengkubuwono II tidak hanya menolak dan menentang untuk memperlakukan *minister* sama seperti raja, tetapi juga menolak beberapa aturan baru lain yang diterapkan oleh Daendles.

Pertama, perjanjian yang menetapkan bahwa tanah-tanah yang diberikan kepada sultan pada setiap pengangkatannya hanya sebagai pinjaman. Aturan ini membuat Sultan Hamengkubuwono II tersinggung dan marah terhadap Belanda.

Aturan tersebut seolah-olah membuat Sultan Hamengkubuwono II harus meminjam tanahnya sendiri.

Kedua, aturan Daendles yang mengambil alih hak pengelolaan hutan dan penyerahan monopoli penebangan kayu milik raja-raja di Jawa. Menurut aturan ini, penebangan kayu harus dikuasai oleh Belanda untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan di Jawa. Daendles merupakan gubernur yang memerintahkan pembangunan infrastruktur jalan raya dari Anyer hingga Panarukan (Marihandono, 2008:31).

Selain menentang Daendles, Sultan Hamengkubuwono II juga melakukan pembersihan pejabat kerajaan yang berpihak kepada penjajah. Salah satunya adalah patih yang pernah diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono II, yakni Danureja II. Patih Danureja II lebih setia terhadap Belanda, maka Sultan Hamengkubuwono II memecatnya dan menggantinya dengan Pangeran Natadiningrat putra Pangeran Natakusuma, saudara Hamengkubuwono II. Langkah lain yang ditempuh Sultan Hamengkubuwono II dalam rangka memerangi dan melawan Belanda adalah mendukung pemberontak anti Belanda yang dipimpin oleh Raden Ranga Prawiradirjo I. Raden Ranga merupakan besan Sultan Hamengkubuwono II.

Dukungan Sultan Hamengkubuwono II terhadap Raden Ranga tidak mampu menaklukkan Belanda. Belanda berhasil menumpas Raden Ranga dan melimpahkan beban tanggung jawab kepada Sultan Hamengkubuwono II, terutama biaya perang. Sultan Hamengkubuwono II tidak terima atas kebijakan Belanda sehingga menyebabkan perang antara pihak Belanda dan Yogyakarta. Peperangan terjadi pada bulan Desember 1810 dimana Daendles membawa pasukannya menyerbu Yogyakarta. Daendles berhasil menurunkan paksa Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono III. Selain menurunkan Sultan Hamengkubuwono II, Belanda juga berhasil menangkap Natakusuma dan Natadiningrat. Kedudukan patih Kasultanan Yogyakarta kembali lagi kepada Danureja II yang memang berpihak kepada Belanda. Kekuasaan Sultan Hamengkubuwono II pada periode pertama berakhir setelah peristiwa tersebut.

Sultan Hamengkubuwono II naik tahta untuk kedua kalinya setahun kemudian setelah diturunkan paksa oleh Daendles, yakni pada akhir 1811. Kekuasaan Daendles berakhir pada bulan Mei tahun 1811 dan digantikan oleh J.W. Jansens. Jabatan Jansens hanya beberapa bulan saja karena pasukan Inggris menyerbu dan memaksa Belanda menyerah di Kali Tuntang, Salatiga, Jawa Tengah. Terjadilah pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris.

Ditengah-tengah pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris, Sultan Hamengkubuwono bangkit dan merebut kembali tahta Kasultanan Yogyakarta. Setelah berhasil merebut kembali tahtanya sebagai sultan keempat Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan untuk menangkap dan menghukum mati Danureja II yang dianggap sebagai biang keladi masalah yang dihadapi Sultan dengan Daendles.

Pada periode pemerintahannya ini, Sultan Hamengkubuwono II tidak lagi menghadapi Belanda, melainkan Inggris dibawah pimpinan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Kehadiran Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal penguasa colonial Inggris di Jawa turut mengokohkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono II dengan tetap mengakui Sultan Hamengkubuwono II sebagai penguasa di daerah Yogyakarta dan menetapkan Sultan Hamengkubuwono III sebagai putra mahkota. Inggris yang juga berstatus sebagai penjajah tetap tidak merubah sikap Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II tetap menentang keras penjajahan Inggris di tanah Jawa.

Penentangan dan perlawanan Sultan Hamengkubuwono II kepada Raffles menyebabkan Sultan Hamengkubuwono II mengalami hukuman buang, yakni dibuang ke Penang. Hukuman ini berawal dari penolakan Sultan Hamengkubuwono II terhadap permintaan Raffles yang meminta beberapa wilayah yang menjadi bekas kekuasaan Daendles kepada Sultan Hamengkubuwono II, yakni daerah Kedu, Bojonegoro, dan Mojokerto. Raffles mengirimkan armada perangnya menuju Yogyakarta untuk menundukkan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II berhasil ditaklukkan karena Raffles dibantu oleh putra mahkota. Setelah Sultan Hamengkubuwono II

diasingkan ke Penang, Sultan Hamengkubuwono III naik tahta untuk kedua kalinya menggantikan Sultan Hamengkubuwono II.

Sultan Hamengkubuwono II kembali naik tahta pada tahun 1826 setelah dibuang oleh Inggris pada periode II pemerintahannya. Pemerintahan pada periode ini berlangsung selama dua tahun, yakni dari tahun 1826 sampai 1828. Sebelum Sultan Hamengkubuwono II dibebaskan dari pengasingannya, di Kasultanan Yogyakarta telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan, yakni dari sultan Hamengkubuwono III sampai Sultan Hamengkubuwono V. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V terjadi perlawanan Diponegoro yang membuat Belanda kewalahan. Pangeran Diponegoro yang bernama asli Raden Mas Ontowiryo adalah salah satu putra dari Sultan Hamengkubuwono III (Ajisaka, 2004:21).

Perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro disebabkan campur tangan yang dilakukan oleh pihak Belanda dalam urusan kerajaan. Belanda yang turut campur dalam urusan intern keraton menurut Diponegoro sangat bertentangan dengan hukum adat dan agama yang berlaku. Belum lagi adanya sekelompok bangsawan istana dan pejabat Belanda yang bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Ketidakpuasan ini membawa Pangeran Diponegoro meninggalkan Keraton Yogyakarta dan tinggal di Tegalrejo. Sementara di keraton, sebuah dewan perwalian dibentuk karena Sultan Jarot atau Hamengkubuwono IV belum cukup dewasa untuk memerintah (Sagimun, 1985:25-26).

Tiga hal yang menyebabkan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertama, kekuatan kolonial sejak awal 1800-an berusaha menanamkan pengaruh di Jawa, khususnya pada pemerintahan kerajaan yang ada. Kebanyakan perilaku orang barat yang berusaha mengubah peraturan-peraturan yang berlaku di keraton mendapat banyak tentangan dari bangsawan istana. Selain itu, kekuasaan para pangeran dan bangsawan administratif pribumi dikurangi dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan (Yamin 1952:16).

Kedua, pertentangan politik yang dilandasi kepentingan pribadi dalam keraton semakin lama semakin meruncing. Pengangkatan Sultan

Hamengkubuwono V yang masih kecil membawa banyak kepentingan pribadi dari dewan perwalian yang dibentuk. Pada tahun 1822 mulai terlihat dua kelompok dalam istana, kelompok pertama terdiri dari Ratu Ibu (ibunda Hamengkubuwono IV), Ratu Kencono (ibunda Hamengkubuwono V) dan Patih Danureja IV. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Pangeran Diponegoro dan Pamannya, Pangeran Mangkubumi. Ketiga, beban rakyat akibat pemberlakuan pajak yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat semakin tertekan. Misalnya, pintu rumah dikenakan bea pacumpleng, pekarangan rumah dikenakan bea pengawang-awang, bahkan pajak jalan pun dikenakan bagi tiap orang yang melintas, termasuk barang bawaannya (Soekanto, 1952:109). Hal ini mengakibatkan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan tidak hanya dari elit istana, tetapi juga dari kalangan masyarakat pedesaan dan elit agama yang dirugikan dengan kebijakan kolonial.

Pada pertengahan tahun 1825, Belanda melalui Residen Smissaert dan Patih Danuredja IV merencanakan pembangunan jalan yang melewati tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sikap Diponegoro kemudian memicu serangan Belanda ke Tegalrejo pada 20 Juli 1825 sebagai awal dari dimulainya Perang Jawa atau lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro. Perang ini membawa kerugian yang cukup besar bagi Belanda, tercatat korban jiwa 8.000 pasukan Eropa dan 7.000 prajurit pribumi terbunuh di pihak Belanda, dengan kerugian materi 20 juta gulden.

Perang Diponegoro berkobar sampai pelosok Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Dukungan kepada Pangeran Diponegoro sendiri berdatangan dari berbagai pihak, bangsawan, tokoh masyarakat, ulama, santri bahkan rakyat jelata. Menghadapi perlawanan ini, pihak kolonial Belanda mendapat banyak bantuan dari penguasa lokal di daerah. Perang yang dilancarkan meluas ke berbagai daerah, bukan hanya di Yogyakarta, tetapi meluas ke daerah Surakarta, Banyumas, Tegal, Pekalongan, Parakan, Wonosobo, Panjer Roma, Bagelen, Semarang, dan Rembang.

Pemimpin perang yang berhasil merugikan pasukan belanda adalah Pangeran Diponegoro, maka perang ini lebih dikenal dengan Perang Diponegoro

yang berlangsung selama lima tahun sejak 1825-1830. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar dan tersengit dalam melawan Belanda, walaupun pada akhirnya kemenangan secara licik berada di pihak Belanda yang menyebabkan Pangeran Diponegoro diasingkan dan dibuang ke Makasar (Anshori, 2007:85).

Pengangkatan Sultan Hamengkubuwono II oleh Belanda dan penurunan Sultan Hamengkubuwono V merupakan salah satu strategi Belanda untuk melawan pemberontakan Diponegoro. Pihak Belanda berharap Sultan Hamengkubuwono II dapat membantu meredam perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Harapan Belanda tidak dapat terwujud, karena Sultan Hamengkubuwono II wafat. Setelah kematian Sultan Hamengkubuwono II wafat, Sultan Hamengkubuwono V diangkat lagi sebagai penggantinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono II sangat gigih menentang kolonial Belanda selama pemerintahannya di Kasultanan Yogyakarta. Kebijakan politik Sri Sultan Hamengkubuwono II merupakan keberlanjutan dari kebijakan politik Sultan Hamengkubuwono I, yakni menentang keras penjajah. Dimulai dari awal naik tahta hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah satu kalipun berkompromi dengan penjajah. Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan lantang menentang VOC dan antek-anteknya yang sudah lama menjajah tanah Jawa. Sultan Hamengkubuwono II adalah orang yang sangat kejam, keras kepala dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.

4.2.3 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono III

Sultan Hamengkubuwono III adalah sultan ketiga dan kelima Kasultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono III naik tahta untuk pertama kalinya pada periode pertama pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, dan naik tahta kembali setelah Sultan Hamengkubuwono II diasingkan oleh pemerintah Inggris.

Nama asli Sultan Hamengkubuwono III adalah Raden Mas Surojo. Pada masa pemerintahan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III menjabat sebagai putra mahkota Kasultanan Yogyakarta. Ketika terjadi permusuhan antara ayahnya dengan VOC dibawah komando Daendles, Sultan Hamengkubuwono III

kemudian diangkat oleh VOC sebagai sultan ketiga menggantikan Sultan Hamengkubuwono II yang diturunkan paksa karena melawan VOC.

Sultan Hamengkubuwono III hanya memimpin selama satu tahun pada periode pertama pemerintahannya. Setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1812 untuk kedua kalinya Sultan Hamengkubuwono III diangkat oleh pemerintah Inggris dibawah komando Raffles sebagai sultan kelima Kasultanan Yogyakarta menggantikan Sultan Hamengkubuwono II yang diasingkan ke Penang. Masa pemerintahan periode kedua Sultan Hamengkubuwono III juga tidak lama yang hanya berkuasa selama dua tahun karena pada tahun 1814, Sultan Hamengkubuwono III menghembuskan napas terakhirnya.

Dinamika politik Kasultanan Yogyakarta dibawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III praktis tidak mengalami perubahan. Sultan Hamengkubuwono III yang memerintah sebanyak dua kali, namun masa pemerintahannya berlangsung sangat singkat. Periode pertama hanya berlangsung selama satu tahun dan periode kedua hanya dua tahun. Dalam waktu yang singkat, Sultan Hamengkubuwono III tidak berbuat banyak untuk Kasultanan Yogyakarta karena pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III, Kasultanan dihadapkan pada kondisi perseteruan antara Belanda dan Inggris.

Pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III dihadapkan pada konsekuensi logis dari perang yang berlangsung antara Sultan Hamengkubuwono II dan Raffles. Konsekuensi dari perang itu kemudian ditanggung oleh Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono III harus menerima tiga konsekuensi dari Inggris. Pertama, beberapa wilayah kekuasaan Yogyakarta harus diserahkan kepada Inggris dan mengganti kerugian sebesar 100.000 real setiap tahunnya. Adapun wilayah-wilayah itu antara lain daerah Kedu, Separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan. Kedua, pada masa Sultan Hamengkubuwono II, angkatan militer Yogyakarta sangat besar melebihi angkatan militer VOC ditanah Jawa. Sebagai konsekuensi dari perang, Inggris memperkecil angkatan perang Yogyakarta dan hanya menempatkan beberapa orang keamanan saja di keraton. Ketiga, sebagian daerah kekuasaan keraton harus diserahkan kepada Pangeran Natakusuma yang diangkat jadi Pakualam I oleh Raffles.

Itulah tiga konsekuensi perang yang dibebankan kepada Kasultanan Yogyakarta dibawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III. Dengan menanggung beban perang yang terjadi antara Sultan Hamengkubuwono II dan Raffles, maka secara otomatis Kasultanan Yogyakarta tidak mengalami perkembangan kecuali kemunduran.

4.2.4 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IV.

Sultan Hamengkubuwono IV adalah sultan keenam Kasultanan Yogyakarta yang menggantikan Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono IV memerintah Kasultanan Yogyakarta selama sembilan tahun. Sultan Hamengkubuwono IV memiliki nama asli Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Hamengkubuwono IV lahir pada tanggal 3 April 1804 dan meninggal pada tanggal 6 Desember 1823. Hamengkubuwono IV merupakan satu-satunya Sultan Yogyakarta yang meninggal di usia muda yakni 19 tahun.

Sultan Hamengkubuwono IV adalah putra kedelapan belas Sultan Hamengkubuwono III yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Pada saat berusia sepuluh tahun, tepatnya tahun 1814 Sultan Hamengkubuwono III yang waktu itu menjabat sebagai Sultan Yogyakarta wafat dan tahta kerajaan jatuh ke tangan Hamengkubuwono IV. Karena usianya baru menginjak sepuluh tahun, maka Hamengkubuwono IV memerintah kerajaan dengan didampingi oleh seorang wali pemerintahan yakni Paku Alam I. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV, justru yang memiliki kuasa luas dan kuat adalah Patih Danureja IV yang merupakan pengikut setia Belanda.

Patih Danureja IV tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menguasai Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang anak muda berusia belasan tahun. Patih Danureja hampir menguasai semua jabatan penting di keraton. Jabatan-jabatan penting keraton diduduki oleh saudara-saudaranya yang diangkat sendiri oleh Patih Danureja IV. Keluarga Danureja yang terkenal sangat tunduk terhadap Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV mendukung pelaksanaan sistem sewa tanah untuk swasta. Hasilnya sangat merugikan rakyat kecil pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV.

Pada tanggal 20 Januari 1820, Paku Alam I mundur dari jabatan wali raja. Pemerintahan mandiri Sultan Hamengkubuwono IV hanya bertahan selama tiga tahun karena ia tiba-tiba meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1823. Sultan Hamengkubuwono IV wafat ketika sedang berlibur, oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwono IV mendapat gelar anumerta sinuhun jarot, seda besiyar.

Sultan Hamengkubuwono IV memimpin Kasultanan Yogyakarta selama Sembilan tahun. Namun, dalam waktu yang cukup lama hampir tidak ada perkembangan signifikan yang terjadi pada Kasultanan Yogyakarta. Hal itu dikarenakan sewaktu memimpin Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IV tidak berkuasa secara penuh dan mutlak melainkan hanya menjadi simbol kerajaan.

4.2.5 Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V

Sultan Hamengkubuwono V adalah putra keenam Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Nama Aslinya adalah Gusti Raden Mas Gatot Menol, lahir pada tanggal 24 Januari 1820. Sultan Hamengkubuwono V memerintah Kasultanan Yogyakarta selama dua periode yang diselingi oleh Sultan Hamengkubuwono II.

Periode pertama pemerintahan Hamengkubuwono V berlangsung dari 19 Desember 1823 sampai 17 Agustus 1826. Sultan Hamengkubuwono V kemudian diturunkan dari tahta oleh Belanda yang waktu itu tengah menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro dan digantikan oleh kakeknya, Sultan Hamengkubuwono II selama dua tahun. Sultan Hamengkubuwono V naik tahta kembali (pemerintahan periode dua) pada tanggal 17 Januari 1828 sampai kematiannya pada tanggal 5 Juni 1855.

Sultan Hamengkubuwono V adalah sultan termuda dari seluruh Sultan Kasultanan Yogyakarta, bahkan di tanah Jawa. Hamengkubuwono V naik tahta untuk pertama kalinya pada tahun 1823 disaat usianya masih 3 tahun. Ketika dewasa, Sultan Hamengkubuwono V mendapat gelar seperti gelar kakek buyutnya (Sultan Hamengkubuwono I), yakni Pangeran Mangkubumi. Adapun pangkat

yang pernah dijabatnya sebelum menjabat sebagai sultan adalah letnan kolonel pada 1839 dan kolonel pada 1847 dari pemerintah Hindia Belanda.

Ketika memerintah Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono V terbilang cukup dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. kedekatannya itu terlihat dari pengangkatannya sebagai sultan menggantikan Sultan Hamengkubuwono IV pada periode pertama dan menggantikan Sultan Hamengkubuwono II pada periode kedua. Meskipun memiliki hubungan dekat dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono V tetap memikirkan kesejahteraan rakyat.

Kedekatannya dengan Belanda merupakan sebuah bentuk taktik perang represif, yang menekankan pada perang tanpa darah. Disamping itu, Sultan Hamengkubuwono V mengharapkan kedekatannya dengan pemerintahan Belanda agar terjalin kerja sama mutualisme antara pihak keranton dan Belanda. Dengan adanya kerja sama saling menguntungkan, maka kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara. Itulah strategi politik yang diterapkan Sultan Hamengkubuwono V ketika memerintah di Kasultanan Yogyakarta.

Kebijakan politik Sultan Hamengkubuwono V tidak mendapat dukungan dari pihak keluarganya. Beberapa kanjeng abdi dalem dan adik sultan sendiri yang bernama Gusti Raden Mas Mustojo, yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono VI menentang kebijakan politik yang diterapkan oleh Sultan Hamengkubuwono V. Penentangan yang dilakuklan oleh para kanjeng abdi dalem dan Gusti Raden Mas Mustojo terhadap kebijakan politik Sultan Hamengkubuwono V lantaran menganggap Sultan Hamengkubuwono V terlalu memihak terhadap Belanda. Dukungan terhadap Sultan Hamengkubuwono V menjadi semakin berkurang.

Perselisihan mengenai kebijakan politik yang diterpakan Sultan Hamengkubuwono V berakhir dengan kematian Sultan Hamengkubuwono V yang dibunuh oleh istri kelimanya sendiri, Kanjeng Mas Hemawati. Kematian Sultan Hamengkubuwono V menguntungkan Gusti Raden Mas Mustojo yang mendapat dukungan dari banyak pihak. Ditambah lagi, waktu itu Gusti Raden Mas Mustojo telah menjalin hubungan dengan Kesultanan Brunei dengan menikahi putri

Kesultanan Brunei. Tidak lama setelah Sultan Hamengkubuwono V wafat, kedudukan sultan digantikan oleh Gusti Raden Mas Mustojo yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono VI.

4.3 DINAMIKA KEAGAMAAN KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830

Dinamika dalam bidang agama Kasultanan Ngayogyakarta berkembang pesat terjadi pada Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Digambarkan bahwa pada masa mudanya, R. M. Sudjono sangat religius, suka berpuasa senin dan kamis, gemar mengaji dan berguru di berbagai pesantren di sekitar Kartasura. Selain belajar agama, sebagai seorang putra raja, ia juga belajar sastra, budaya dan tradisi Jawa. Ini yang kelak berpengaruh terhadap visinya dalam membangun pendidikan Islam di Kraton Yogyakarta. Kehidupannya yang sangat sederhana di luar istana menjadikannya tumbuh sebagai pribadi yang sederhana, taat ajaran agama, dan bertradisi Jawa (Maharsi, 2007:205).

Kebesaran sosok Sultan Hamengkubuwono I dalam bidang agama terlihat dari caranya memimpin. Salah satu cara yang menjadi kebiasaan Sultan Hamengkubuwono I selama memerintah Kasultanan Yogyakarta adalah menyelesaikan segala persoalan dengan cara berolah batin. Sultan Hamengkubuwono I adalah sosok sultan yang sangat tekun berolah batin untuk menentramkan situasi yang kacau melalui bisikan gaib dari Tuhan (Artha, 2009:61). Sultan Hamengkubuwono I membangun keraton Yogyakarta dengan memasukkan pesan bermakna simbolisme falsafah Islam dan Jawa.

Bersamaan dengan pembangunan bangunan-bangunan keraton lainnya, Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kelengkapan keraton, salah satunya adalah Masjid Gedhe Kauman. Masjid Gedhe Kauman adalah pusat kehidupan di Yogyakarta, bagian dari kawasan yang menjadi denyut jantung masyarakat karena lokasi Masjid Gedhe Kauman berdekatan dengan pasar dan alun-alun, dua pusat keramaian dan urat nadi kehidupan masyarakat (Basral, 2010:5). Foto Masjid Gedhe Kauman dapat dilihat pada lampiran halaman 78.

Berdirinya sebuah masjid besar di dekat keraton menampilkan pesan yang sangat jelas bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan para keturunannya kelak, bukan semata-mata berfungsi sebagai *Senapati Ing Ngalogo* (pimpinan perang dan pemerintahan), melainkan juga sebagai *Sayyidin Panatagama Khalifatullah* alias wakil Allah Swt. di dunia dalam memimpin pelaksanaan agama (Abimanyu, 2015:187).

Di Kauman, posisi masjid terpancang megah di sebelah barat alun-alun utara keraton. Riwayat Masjid Gedhe Kauman menghulu sampai ke Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I, Susuhunan pertama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang mendirikan kerajaan ini pada tahun 1755. Masjid Gedhe dibangun berdasarkan rancangan Kyai Haji Wiryokusumo, dan selesai pengerjaannya pada 29 Mei 1773 atau 18 tahun setelah Sultan Hamengkubuwono I berkuasa.

Konsep Jawa memandang Sultan sebagai seseorang yang dianugerahi kerajaan dengan kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang absolut. Hal ini tercermin dari gelar Sultan yang secara lengkap *Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah fil ardh*. Dalam gelar tersebut terkandung makna bahwa sultan selain pemimpin wilayah (*hamengku Buwono*), panglima perang (*senapati ing Ngalaga*), dan hamba Allah (*Ngabdurrahman*) juga sekaligus sebagai pemimpin agama (*Sayidin Panata Gama*) dan khalifah (*khalifat ullah fil ardh*) (Sumarjan, 1981:23).

Dalam posisinya sebagai pemimpin agama inilah akan terlihat bagaimana peran sultan dalam perkembangan pendidikan Islam di Yogyakarta. Visi pendidikan Islam Sri Sultan Hamengku Buwono I terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

4.3.1 Sultan Hamengkubuwono I Mendirikan Sekolah Tamanan.

Sekolah ini didirikan pada tahun 1757 yang mengandung dua muatan utama, yaitu *pendidikan yang dimaksudkan untuk membentuk jiwa/karakter*

ksatriya dan pendidikan yang berdasarkan nilai ketentaraan, pertanian, dan kebudayaan (Jatiningrat, 1956:64).

Tujuan yang pertama diwujudkan dengan muatan pelajaran yang diberikan yaitu: (1) bahasa dan kesustraan Jawa Baru dan Kawi; (2) Sejarah Kraton Yogyakarta; (3) Menyanyi (nembang) Mocapat, Tengahan, dan Gedhe; (4) Tata Negara; (5) Undang-Undang Sepuluh; (6) Angger Pradhata dan Pidana (Hukum Perdata dan Pidana); (7) Mengaji: kitab turutan, Qur'an dan Tafsir, Hukum Agama, tradisi dari mataram sampai Ngayogyakarta Hadiningrat yang berhubungan dengan agama, perail (hukum waris Islam), dan perkawinan dan talak. Tujuan yang kedua muatan mata pelajaran sebagai berikut: (1) Menari (tarian putri); (2) Menari (tarian laki-laki); (3) memilih dan menunggang kuda; (4) latihan berperang (setiap hari Sabtu di Alun-Alun Utara dari jam 16.00 – 18.00); (5) latihan memanah; (6) menatah dan menyungging wayang; (7) membuat dan melaras gamelan; (8) seni bangunan; (9) memelihara segala tanam-tanaman pekarangan, ladang, sawah, dan perkebunan; (10) membuat dan memelihara saluran pengairan dan bendungan untuk pertanian rakyat.

4.3.2 Sultan Hamengkubuwono I Mendirikan Masjid Keprabon (Masjid Gedhe Kauman).

Perkembangan pendidikan Islam di Kraton Yogyakarta ditandai dengan dibangunnya masjid agung di kompleks kraton, yang sekarang disebut dengan masjid besar Kauman. Saat ini, masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Bangunannya secara keseluruhan seluas 2.578 m² yang terdiri dari ruang utama 784 m² dan serambi 1.102 m² di atas tanah seluas 4000 m² (Hamzah, 2007:1).

Masjid Gedhe Kauman dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I bersama Kyai Faqih Ibrahim Diponingrat (penghulu kraton pertama) dan Kyai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Masjid ini dibangun pada hari Ahad Wage, 29 Mei 1773 M atau 6 Robi'ul Akhir 1187 H. Masjid ini adalah masjid keprabon, sebagai tempat ibadah sekaligus lembaga pendidikan Islam bagi masyarakat dalam beteng kraton. Posisi masjid keprabon memiliki makna tersendiri dalam

perspektif ilmu lingkungan, apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan masjid-masjid yang disebut sebagai masjid Pathok Negoro yang terdapat di empat penjuru kraton Yogyakarta (Suharjo, 2004:27).

Bukan hanya Sri Sultan Hamengku Buwono I, raja-raja mataram Islam, di samping mendirikan istana sebagai tempat kedudukan pemerintahannya juga membangun masjid. Saat pusat kerajaan masih di Kotagede, di sana juga dibangun sebuah masjid sebagai pusat keagamaan dan pendidikan. Saat pemerintahan pindah ke Plered Bantul, di sana juga dibangun Masjid Agung yang terletak di dusun Kauman, sebelah barat laut Desa Kedaton. Demikian juga ketika Mataram Islam pindah ke Kartasura juga didirikan masjid agung. Di berbagai tempat itu, kampung yang berada di sebelah masjid dinamakan Kauman karena disitu oleh Sultan ditempatkan para pengurus masjid yang, tempat para kaum (*Qaimuddin: penegak agama*). Kepengurusan masjid pada awalnya dipegang oleh Penghulu Kraton, dibantu oleh Ketib, Modin, Merbot, dan abdi dalem pametakan, abdi dalem Kaji Selusinan, serta abdi dalem berjamangah (Hamzah, 2007:5). Keberadaan masjid keprabon tidak disangsikan lagi fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagaimana lazimnya perkembangan pendidikan Islam pada masa awal juga berangkat dari masjid sebagai lembaga pendidikan.

4.4 DINAMIKA BUDAYA KASULTANAN NGAYOGYAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA-RAJA TAHUN 1755-1830

Dinamika budaya yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta berkembang pesat pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono I meninggal dengan mewariskan sejumlah karya arsitektur yang cukup monumental. Salah satu buah karya arsitektur monumental yang menjadi warisan atau peninggalan Sultan Hamengkubuwono I adalah Taman Sari Keraton Yogyakarta.

Sejumlah karya hasil peninggalan dalam bentuk seni sastra maupun seni arsitektur yang dihasilkan Sri Sultan Hamengkubuwono II antara lain adalah Serat Surya Raja dan Situs Gembirawati. Karya-karya yang dihasilkan oleh Sultan

Hamengkubuwono II menjadi pengingat terhadap kebijakan, tindakan, dan watak dari Sri Sultan Hamengkubuwono II semasa hidupnya.

4.4.1 Perkembangan Budaya Kasultanan Ngayogyakarta pada Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I

Sri Sultan Hamengku Buwono I memerintah selama hampir 40 tahun, dari 13 Februari 1755 hingga wafatnya pada Minggu Kliwon, 24 Maret 1792 dalam usia 75 tahun. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga oleh rakyatnya dijuluki *Sinuwun Suwargo*. Di bawah kepemimpinannya, seni dan budaya berkembang. Beliau adalah ahli tari dan musik gamelan. Beliau menciptakan tari Srimpi dan Bedoyo, juga tarian perang yang bernama Beksan Lawung. Dalam hal musik, beliau menciptakan Gending Gajah Endro yang hanya boleh dimainkan saat raja berjalan ke tahtanya untuk melakukan *siniwaka* (pertemuan) dengan para pengeran, bupati, demang, dan ronggo (Suyanto, 2010:7).

Sultan Hamengkubuwono I tidak hanya bijaksana dan ahli dalam strategi perang, Sultan Hamengkubuwono I adalah seorang pengagum keindahan. Peninggalan-peninggalan berupa karya arsitektur pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I menjadi bukti perkembangan budaya bagi Kasultanan Ngayogyakarta. Salah satu buah karya arsitektur monumental yang menjadi warisan atau peninggalan Sultan Hamengkubuwono I yang hingga kini masih bisa kita nikmati, adalah Taman Sari Keraton Yogyakarta. Taman Sari Keraton Yogyakarta menjadi salah satu objek wisata mengagumkan di Keraton Yogyakarta yang banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Pada awalnya, Taman Sari Keraton Yogyakarta bernama *The Fragrant Garden*. Taman Sari Keraton Yogyakarta dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1758 (Abimanyu, 2015:180). Terdapat beberapa bagian yang menjadi isi taman, diantaranya adalah gedung, kolam, pemandian, jembatan gantung, kanal air, hingga danau buatan lengkap dengan pulau dan lorong bawah airnya. Nilai artistik Taman Sari Keraton Yogyakarta lebih banyak menunjukkan sisi kesejukan air.

Taman Sari Keraton Yogyakarta sering disebut sebagai istana air (*water castle*). Sebutan istana air dikarenakan nilai arsitektur dan keunikan pada lekukan bangunan dan air yang terisi di kolam-kolam. Kolam-kolam dipergunakan oleh raja Yogyakarta untuk melakukan mandi pada bulan-bulan tertentu (Abimanyu, 2015:181). Ketika raja hendak masuk menuju istana air atau taman sari, maka disambut dengan musik gamelan yang dilagukan dari bangunan-bangunan kecil yang ada di depan istana air taman sari disertai upacara tertentu untuk menyambut raja (Sabdacarakatama, 2009:65).

Secara umum, kompleks taman sari dapat dibagi menjadi empat bagian utama, yakni danau buatan sebelah barat, Pemandian Umbul Binangun di sebelah selatan danau buatan, Pesarean Ledok Sari dan Kolam Garjitawati di sebelah selatan, dan kompleks Magangan di sebelah timur.

Sultan Hamengkubuwono I selain membangun Taman Sari Keraton Yogyakarta, pada masa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono I juga membawa ahli karawitan, ahli pedalangan, ahli tatah sungging, dan ahli tari antara lain Ki Sura Brata dan Ki Prawira Laya sebagai Empu Tari. Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah peletak dasar tari Klasik Gaya Yogyakarta mataraman, Sultan Hamengkubuwono I pencipta falsafah Joged Mataram sebagai pokok kaidah penghayatan tari gaya Yogyakarta, dan lebih lanjut lagi sebagai falsafah hidup rakyat mataram (Sabdacarakatama, 2009:71).

4.4.2 Perkembangan Budaya Kasultanan Ngayogyakarta pada Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II

Sultan Hamengkubuwono II wafat pada tanggal 3 Januari 1828 di usia 77 tahun. Sultan Hamengkubuwono II memiliki sejumlah karya peninggalan dalam bentuk seni sastra maupun seni arsitektur. Karya-karya yang dihasilkan oleh Sultan Hamengkubuwono II menjadi pengingat terhadap kebijakan, tindakan, dan watak Sri Sultan Hamengkubuwono II semasa hidupnya. Beberapa buah karya peninggalan Sultan Hamengkubuwono II antara lain adalah:

1) Serat Surya Raja

Serat Surya Raja adalah karya sastra yang digubah oleh Sultan Hamengkubuwono II. Dalam bahasa Indonesia, Serat Surya Raja disebut Buku Matahari Raja-raja. Serat Surya Raja menggambarkan tentang bagaimana seandainya dua buah kerajaan bersatu kembali dibawah kepemimpinan seorang raja yang arif. Dua kerajaan yang dimaksud adalah dua pecahan Mataram Islam, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Serat Surya Raja menjadi salah satu tanda kebesaran (pusaka) kerajaan yang keramat dari Kasultanan Yogyakarta (Ricklefs, 2008:225). Hingga saat ini, Serat Surya Raja masih sering dibacakan dalam acara-acara *macapat* di daerah Yogyakarta.

2) Situs Gembirawati

Peninggalan lain dari Sultan Hamengkubuwono II adalah berupa situs Gembirawati. Situs Gembirawati memiliki luas 13.200 meter persegi dan terletak pada ketinggian 138 mdpl. Situs Gembirawati memiliki struktur bangunan berteras dan berbahan batu putih. Situs Gembirawati digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono II sebagai pesangrahan selama memerintah di Kasultanan Yogyakarta.

BAB 6.PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab empat dan lima, maka diperoleh tiga kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) dinamika Kasultanan Ngayogyakarta tahun 1755-1830 dalam bidang politik, agama dan kebudayaan pada tiap pemerintahan berbeda-beda. Dalam kurun waktu 75 tahun sejak disepakatinya Perjanjian Giyanti hingga tahun 1830-an, terhitung ada lima sultan yang memerintah di Kasultanan Yogyakarta secara bergantian dan hierarki. Dalam pemerintahannya, terjadi perkembangan, perubahan serta keberlanjutan baik dalam bidang politik, agama dan kebudayaan Kasultanan Yogyakarta. Raja-raja yang memerintah Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755-1830 antara lain yakni, Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah sejak 13 Februari 1755 hingga 24 Maret 1792, Sri Sultan Hamengkubuwono II (2 April 1792-akhir 1810, akhir 1811-20 Juni 1812, dan 17 Agustus 1826-2 Januari 1828), Sri Sultan Hamengkubuwono III (akhir 1810-akhir 1811 dan 29 Juni 1812-3 November 1814), Sri Sultan Hamengkubuwono IV yang memerintah sejak 9 November 1814 hingga 6 Desember 1823 dan Sri Sultan Hamengkubuwono V (19 Desember 1823-17 Agustus 1826 dan 17 Januari 1828-5 Juni 1855)
- 2) dinamika Kasunanan Surakarta sejak tahun 1755 hingga 1830 tercatat diperintah oleh empat raja secara bergantian, yakni Sri Susuhunan Pakubuwono III yang memerintah dari tahun 1749 sampai 1788, Sri Susuhunan Pakubuwono IV yang memerintah dari tahun 1788 sampai 1820, Sri Susuhunan Pakubuwono V yang memerintah dari tahun 1820 hingga 1823 dan Sri Susuhunan Pakubuwono VI yang memerintah dari tahun 1823 sampai 1830. Dinamika politik, agama dan kebudayaan dalam pemerintahan raja-raja Kasunanan Surakarta berbeda-beda, ada yang mengalami perkembangan, perubahan serta keberlanjutan setelah pemerintahan sebelumnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar mengenai dinamika kerajaan Mataram Islam pasca perjanjian Giyanti.
2. bagi akademis, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan pembaca diharapkan dapat menambahkan dan mengembangkan penelitian mengenai dinamika Kerajaan Mataram Islam pasca perjanjian Giyanti dalam sejarah bangsa Indonesia lainnya.
3. bagi almamater, sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, S. 2015. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*. Yogyakarta : Saufa.
- Ajisaka, A. 2004. *Mengenal Pahlawan Indonesia*. Jakarta : Kawan Pustaka.
- Anshori, M.J. 2007. *Sejarah Nasional Indonesia : Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta : Mitra Aksara Panaitan.
- Any, A. 1980. *Raden Ngabehi Ronggowarsito, Apa yang Terjadi*. Semarang : Anea Ilmu.
- Arifin, H.B. 1996. *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Artha, A.T. 2009. *Laku Spiritual Sultan : Langkah Raja Jawa Menuju Istana*. Yogyakarta : Galang Press.
- Bima. 2008. *Pahlawan Indonesia*. Jakarta : Media Pusindo.
- Bruinessen, M. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung : Mizan.
- Burhanudin, J. 2013. *Ulama Kekuasaan : Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung : Mizan Publika.
- Cribb, R. 2004. *Historical Dictionary of Indonesia*. Scarecrow Press.
- Dahrendorf, R. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri : Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta : Rajawali.
- Duverger, M. 1985. *Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah : Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Graaf, D. 1985. *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa (Peralihan Dari Majapahit ke Mataram)*. Yogyakarta. Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Harun, M.Y. 1995. *Kerajaan Islam Nusantara*. Yogyakarta. Kurnia Kalam Sejahtera.
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.

- Hendriatmo, A. S. 2006. *Giyanti 1755 : Perang Perebutan Mahkota III dan Terpecahnya Kerajaan Mataram Menjadi Surakarta dan Yogyakarta*. Tangerang. CS Book.
- Irwan, R.M. 2012. *Rahasia Yang Tersimpan Ternyata Napoleon Bonaparte Seorang Muslim*. Yogyakarta : Titik Media Publisher.
- Kartodirdjo, S. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komaruddin, H. 2008. *Reinventing Indonesia : Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Bandung : Mizan.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Intepretasi Untuk Aksi*. Bandung : Mizan
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Mahawirna, P. 2013. *Cinta Pahlawan Nasional Indonesia*. Jakarta : Wahyu Media.
- Marihandono, D. 2008. *Sultan Hamengkubuwono II : Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta : Banjar Ali.
- Martha, S. 2009. *Peta Kamasurta : Anda Perlu Tahu tentang Kejadian Menarik Seputar Survei dan Pemetaan*. Jakarta : Nawas.
- Mirnawati. 2012. *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*. Depok : CIF.
- Nuralia, L. 2010. *Kisah Perjuangan Pahlawan Indonesia*. Bandung : Ruang Kata.
- Poesponegoro dan Djoened, M. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pranoto, S. W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Purwadi dan Endang, W. 2015. *Perjanjian Giyanti*. Yogyakarta : Laras Media Prima.
- Qayyum, A. 1983. *Surat-surat Al-Ghazali kepada Para Penguasa, Pejabat Negara, dan Ulama Sejamannya*. Bandung: Mizan.

- Ricklefs, M.C. 1974. *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792*. London : Oxford University Press.
- Sabdacaratakama. 2009. *Sejarah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta : Narasi.
- Soedarisman, P. 1985. *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Soedarmanta, J.B. 2009. *Jejak-Jejak Pahlawan Perikat Kesatuan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Grasindo
- Soekanto. 1952. *Sekitar Jogjakarta 1755-1825*. Jakarta : Mahabarata.
- Soekirno, A. 2011. *Cerita Rakyat Jawa Tengah : Pangeran Sember Nyawa*. Jakarta : Grasino.
- Soeratman, D. 1989. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta : Taman Siswa.
- Solikhin, M. 2009. *Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi.
- Subkhan, I. 2007. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sujatmiko, E. 2014. *Kamus Kebahasaan dan Kesusastraan*. Yogyakarta : Aksarra Sinergi Media.
- Swantoro, P. 2002. *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Jember University Press.
- Woodward, M. 2008. *Islam Jawa : Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta : LKiS.
- Zudianto, H. 2008. *Kekuasaan sebagai Wakaf Politik*. Yogyakarta : Kanisius.

Skripsi

- Mastingah. 2010. *Sekitar Perjanjian Giyanti 1755 M*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN A

Matriks Penelitian

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Sifat Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Indonesia	Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi	Kajian Pustaka	1) bagaimana dinamika Kasultanan Ngayogyakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755-1830? 2) bagaimana dinamika Kasunanan Surakarta pasca perjanjian Giyanti tahun 1755-1830?	1. Buku 2. Skripsi 3. Jurnal Nasional 4. Internet

LAMPIRAN B. LAMPIRAN PETA

Peta Wilayah Kekuasaan Mataram Islam.



Sumber: Saripedia.wordpress.com

Lokasi Desa Sala



Sumber: Abimanyu, S. 2015. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*. Yogyakarta : Saufa.

LAMPIRAN C. LOKASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN GIYANTI

Tempat Penandatanganan Perjanjian Giyanti



Sumber: Abimanyu, S. 2015. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*. Yogyakarta : Saufa.

**LAMPIRAN D. KARYA-KARYA SENI HASIL KEBUDAYAAN
KASULTANAN YOGYAKARTA DAN KASUNANAN SURAKARTA**
Masjid Gedhe Kauman atau Masjid Besar Yogyakarta



Sumber: Purwadi dan Endang, W. 2015. *Perjanjian Giyanti*. Yogyakarta : Laras Media Prima.

Masjid Agung Surakarta



Sumber : <https://www.pegipegi.com>

**LAMPIRAN E. TOKOH-TOKOH YANG TERLIBAT SEKITAR
PERJANJIAN GIYANTI**

Thomas Stamford Raffles (gubernur Inggris pada masa pemerintahan Sri Sultan
Hamengkubuwono II)



Sumber : Abimanyu, S. 2015. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*. Yogyakarta :
Saufa.
Pangeran Diponegoro



Sumber : Abimanyu, S. 2015. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*. Yogyakarta :
Saufa.